

PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI JAWA TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

PENDAHULUAN

BAB I Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Dengan ditetapkannya Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, telah dilaksanakan perubahan mendasar acuan kerja pemerintahan ke paradigma pelayanan dan pemberdayaan. Implementasi reformasi pengelolaan keuangan tersebut adalah Undang- Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang dijabarkan dalam aturan-aturan pokok yang mencakup antara lain :

- a. Akuntabilitas berorientasi pada hasil
- b. Profesionalitas
- c. Proporsionalitas
- d. Keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara
- e. Pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri

Salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintahan. Laporan Keuangan dimaksud meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Laporan Keuangan tersebut disusun dan disajikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

Dalam penyusunan Laporan Keuangan dibedakan menjadi 2 (dua) entitas yaitu entitas pelaporan dan entitas akuntansi. Dinas

Perikanan Dan Kelautan Provinsi Jawa Timur adalah entitas akuntansi yang berada dalam lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai entitas pelaporan.

Laporan keuangan yang disusun oleh Dinas Perikanan Dan Kelautan Provinsi Jawa Timur menginformasikan seluruh transaksi selama periode pelaporan, selain itu juga berfungsi membandingkan realisasi pendapatan dan belanja sesuai anggaran yang ditetapkan. Membantu dalam menilai kondisi keuangan, efektif dan efisien dalam penyelenggaraan pelaksanaan realisasi anggaran serta menentukan ketaatan terhadap kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan dalam pengelolaan keuangan daerah.

1.2. Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menetapkan :

- a. Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.
- b. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu system yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah

Laporan Keuangan Dinas Perikanan Dan Kelautan Provinsi Jawa Timur menyajikan informasi yang bermanfaat bagi pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan, baik ekonomi, sosial maupun politik dengan menyajikan informasi yang berkaitan dengan keuangan dalam hal pendapatan, belanja, aset, kewajiban, ekuitas dana dan arus kas.

Maksud penyusunan Laporan Keuangan ini adalah wujud pertanggungjawaban Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Perikanan Dan Kelautan Provinsi Jawa Timur dalam menjelaskan kinerja penyelenggaraan Program dan

Kegiatan kepada masyarakat. Pertanggungjawaban ini bukan semata-mata untuk menunjukkan kelemahan pelaksanaan program dan kegiatan melainkan untuk melaksanakan asas efisiensi, efektifitas serta fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan.

Tujuan penyusunan Laporan Keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan Satuan Kerja Dinas Perikanan Dan Kelautan Provinsi Jawa Timur, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan SKPD selaku entitas pelaporan yang secara spesifik tidak hanya bermanfaat bagi pengguna dalam mengevaluasi dan membuat keputusan mengenai alokasi sumber daya tapi juga berguna dalam pengambilan keputusan serta menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan, dengan :

- a. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran
- b. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumberdaya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan serta peraturan perundangan yang berlaku
- c. Menyediakan informasi mengenai sumberdaya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan serta hasil-hasil yang telah dicapai
- d. Menyediakan informasi entitas pelaporan dalam mendanai seluruh kegiatan dan mencukupi kebutuhan Kas
- e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaan yang berasal dari pungutan Retribusi
- f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode berjalan

Maka berdasarkan ketentuan yang ada, Laporan Keuangan Dinas Perikanan Dan Kelautan Provinsi Jawa Timur ini disusun

sebagai pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 tahun 2010 tanggal 27 Desember 2010 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Jawa Timur, Tahun Anggaran 2011 dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 tahun 2011 tanggal 14 Oktober 2011 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur TA 2011.

1.3. Landasan hukum penyusunan laporan keuangan

1. UUD 1945 Pasal 23
2. UU Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 31 ayat (1), ayat (2)
3. UU Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. UU Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
5. UU Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
6. UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
7. UU Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 5 April 2007 Nomor 900/316/BAKD/2007 tentang Pedoman Sistem dan Prosedur Penatausahaan dan Akuntansi, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;

13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 tahun 2010 tanggal 30 Desember 2009 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Jawa Timur, Tahun Anggaran 2011;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2011 tanggal 14 Oktober 2011 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2011;
15. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor : 109 Tahun 2010 tanggal 27 Desember 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
16. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor : 75 Tahun 2011 tanggal 14 Oktober 2011 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2011;
17. Keputusan Gubernur Nomor 188/691/KPTS/013/2010 Tanggal 16 Desember 2010 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011.
18. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perikanan Dan Kelautan Provinsi Jawa Timur Nomor : 914 / 71 / 213 / 2011 Tanggal 3 Januari 2011
19. Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Nomor : 914/196.P/213/2011. tanggal 24 Oktober 2011.

1.4. Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan

Bab I Pendahuluan

Memuat penjelasan mengenai latar belakang, maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan, landasan hukum penyusunan laporan keuangan dan sistematika isi catatan atas laporan keuangan

Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD

Ekonomi makro yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan APBD, serta perubahan anggaran yang dilakukan.

Kebijakan keuangan, mengenai kebijakan keuangan Indikator pencapaian target kinerja APBD, menyajikan informasi tentang indikator pencapaian target kinerja APBD

Bab III Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan

Memuat realisasi pencapaian efektifitas dan efisiensi dari target kinerja keuangan. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

Bab IV Kebijakan Akuntansi

Entitas akuntansi keuangan daerah, memuat informasi tentang pelaporan keuangan SKPD.

Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan, penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah.

Bab V Penjelasan pos-pos laporan keuangan

Rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan, pendapatan, belanja, asset, ekuitas dana dan pengungkapan atas pos-pos asset sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja serta rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas.

BAB VI Penjelasan atas informasi- informasi non keuangan

Memuat informasi tentang hal-hal yang belum diinformasikan dalam bagian manapun dari laporan keuangan

BAB VII Penutup

Memuat uraian penutup berupa simpulan-simpulan penting tentang laporan keuangan.

BAB II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD

2.1. Ekonomi makro

Provinsi Jawa Timur merupakan barometer perekonomian Nasional setelah DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat, sebab kontribusi PDRB Jawa Timur terhadap PDB Nasional mencapai 16 %. Perekonomian Jawa Timur ditopang oleh sembilan (9) sektor sumber perekonomian. Enam sektor menunjukkan pertumbuhan lebih tinggi dibanding tiga (3) sektor lainnya. Enam sektor yang dimaksud adalah Sektor Pertambangan dan Pengecilian, Sektor Industry, Sektor Listrik Gas dan Air bersih, Sektor Konstruksi, Sektor Perdagangan, Sektor Hotel dan restoran serta Sektor Keuangan dan Sektor Jasa Perusahaan. Sedangkan ke tiga sektor lainnya adalah Sektor Pertanian, Sektor Pengangkutan dan Sektor Komunikasi dan Jasa.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jawa Timur Atas Dasar Harga Berlaku (AHDB) menunjukkan peningkatan yang signifikan pada Tahun 2010 sebesar Rp.778,46 trilyun meningkat sebesar Rp 91,61 Trilyun (13,34 persen) dari tahun 2009 yaitu sebesar Rp 686,85 Trilyun.

Provinsi Jawa Timur memiliki potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dibidang perikanan dan kelautan yang cukup besar dan prospektif, oleh karena itu peran dan dukungan APBD Jawa Timur terhadap PDRB dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap kesejahteraan masyarakat di wilayah Jawa Timur.

Perkembangan ekonomi Jawa Timur yang masih fluktuatif dan belum memberikan perbaikan secara berkelanjutan terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat terutama yang tinggal di pedesaan, hingga saat ini belum dapat dirasakan oleh para petani dan nelayan. Hal ini ditunjukkan dengan besaran Nilai Tukar

Petani (NTP) dengan indeks NTP Jawa Timur tahun 2010 sebesar 98,87%, turun sebesar 0,37 % dibanding tahun sebelumnya.

Sementara itu, tingkat kesejahteraan masyarakat nelayan kondisinya masih lebih baik. Hal ini dilihat dari Nilai Tukar Nelayan (NTN) tahun 2010 sebesar 148,40, lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya sebesar 140,10. Besaran ini menunjukkan bahwa indeks harga produk yang diterima oleh nelayan lebih tinggi dari indeks harga yang harus dibayar oleh nelayan. Disamping itu adanya anomali iklim yang disertai dengan angin kencang menyebabkan banyak nelayan yang tidak turun melaut, sehingga suplay ikan dipasaran menjadi berkurang dan harga ikan menjadi mahal.

Kenaikan indeks NTN tahun 2010 ini dipengaruhi oleh naiknya indeks harga yang diterima nelayan sedangkan indeks harga yang dibayar nelayan justru cenderung stabil. Hal ini masih dipengaruhi oleh kondisi cuaca yang tidak menentu, musim hujan dan musim angin yang panjang menyebabkan banyak nelayan yang jarang melaut, kelangkaan ikan dipasaran mengakibatkan mahalnya harga ikan.

Perbedaan situasi dan kondisi perekonomian yang jauh berbeda selama periode satu tahun menjadi penyebab yang lain dari tingginya indeks harga yang diterima oleh nelayan. Kenaikan yang tinggi dari indeks harga yang diterima nelayan tersebut, tidak langsung menjadikan kesejahteraan nelayan menjadi lebih baik. Kondisi ini hanya sebagai dampak dari tingginya produksi yang harus dikeluarkan oleh nelayan selama melaut. Komponen biaya yang paling besar adalah pengeluaran untuk bahan bakar minyak (BBM).

Meskipun, ada kebijakan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) untuk meringankan pengeluaran biaya nelayan, tidak menjadi nilai tukar nelayan (NTN) pada tahun 2010 bergerak stabil. Hal ini karena kebijakan penyesuaian harga BBM juga diikuti oleh konversi bahan bakar tanah yang menyebabkan minyak tanah sulit dicari dipasaran sehingga harganya sangat tinggi, padahal

minyak tanah ini dimanfaatkan untuk campuran BBM untuk kapal motor nelayan.

Hal ini memberikan pengaruh terhadap biaya produksi, untuk menyikapi kondisi ini beberapa nelayan biasanya membentuk kelompok untuk melaut. Masing-masing kelompok memberikan informasi tentang posisi ikan pada kelompok yang lainnya. Dengan demikian terjadi efisiensi biaya, karena nelayan tidak harus mencari ikan dilaut karena sudah mengetahui posisi ikan dan hanya menangkap ikan saja. Naiknya perkembangan NTN selama tahun 2010 juga disebabkan karena kondisi musim yang kurang baik, angin kencang, gelombang tinggi dan banyak turun hujan.

Berhentinya aktivitas nelayan ini menyebabkan harga naik, sehingga indeks yang diterima selalu berkembang diatas 100. Selain itu, indeks harga yang dibayar nelayan perkembangannya tidak lebih tinggi dari perkembangan harga ikan laut. Kenaikan indeks yang dibayarkan oleh nelayan sangat dipengaruhi oleh kenaikan dari indeks konsumsi makanan, sedangkan perkembangan harga non makanan dan biaya produksi cenderung tetap.

Dari berbagai potensi perikanan dan kelautan yang dimiliki Jawa Timur serta dengan program-program yang dilaksanakan melalui Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur, hal tersebut diharapkan menyentuh pada kepentingan rakyat dan memberikan nilai manfaat bagi kehidupan masyarakat nelayan, petani, pengolah ikan, serta stockholder lainnya untuk keluar dari krisis ekonomi.

Adapun kegiatan yang perlu mendapat dukungan Pemerintah adalah masalah kemiskinan, pengangguran, penciptaan lapangan kerja baru, serta pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau pulau kecil, pengarusamaan gender, gerakan memasyarakatkan makan ikan, penyediaan pangan dan keamanan pangan melalui jaminan mutu produk perikanan.

Kegiatan tersebut dapat dilaksanakan bilamana tersedia Anggaran Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dengan kata lain bahwa peran dan dukungan APBD terhadap PDRB Jawa Timur masih sangat diperlukan menuju Jawa Timur yang sejahtera, sehat dan damai.

2.2. Kebijakan keuangan

Kebijakan di bidang keuangan daerah meliputi 2 (dua) aspek penting yaitu kebijakan di bidang penerimaan / pendapatan daerah (revenue policy) dan kebijakan di bidang pembelanjaan keuangan daerah (expenditure policy). Kebijakan tersebut mempunyai nilai yang sama penting dan masing-masing harus dapat bersinergi. Idealnya expenditure policy adalah merupakan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, disamping itu juga dapat meningkatkan penerimaan daerah. Sebaliknya revenue policy dapat mendukung berbagai kebijakan anggaran, terutama pada sisi pengeluaran.

Dari berbagai sumber pendapatan yang diperoleh, melalui kebijakan pengelolaan keuangan pada tahun 2011 diimplementasikan untuk mewujudkan Visi : *Terwujudnya Jawa Timur yang Makmur dan Berakhlak dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia*, serta Misi : *Mewujudkan Makmur bersama Wong Cilik melalui APBD untuk Rakyat*.

Pendapatan daerah (langsung) diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau pungutan lainnya, yang dibebankan pada seluruh masyarakat. Upaya yang dilakukan dalam dalam melakukan pungutan terhadap pos-pos tersebut melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi dengan berprinsip pelayanan optimal serta tidak memberatkan masyarakat.

Kebijakan anggaran Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 juga diarahkan untuk mendukung prioritas Pembangunan Pemerintah Pusat yaitu *Memacu Pertumbuhan (Pro Growth)*, *Menciptakan dan Memperluas Lapangan Kerja (Pro Job)* serta *mengurangi kemiskinan (Pro Poor)*.

Kebijakan dan program pembangunan Tahun 2011 juga didukung dengan alokasi dana tambahan melalui Perubahan Anggaran yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Perubahan APBD Tahun 2011 dan Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 75 Tahun 2011 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2011.

Pemerintah Daerah harus mengalokasikan belanja daerah secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dalam memberikan pelayanan umum.

Kebijakan umum APBD tahun 2011 adalah :

1. Pendapatan

- a. Peningkatan target pendapatan daerah baik pajak langsung maupun tidak langsung secara terencana sesuai kondisi perekonomian dengan memperhatikan kendala, potensi dan coverage Ratio yang ada,
- b. Mengembangkan kebijakan pendapatan daerah yang dapat diterima masyarakat, partisipatif, bertanggungjawab dan berkelanjutan.
- c. Perluasan sumber-sumber penerimaan daerah.

Pendapatan Dinas Perikanan dan Kelautan tahun 2011 berasal dari Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, Pendapatan Sewa dan Penerimaan Lain-lain.

Retribusi Jasa Umum berasal dari Pengujian Kapal Perikanan dan Ijin usaha Penangkapan / pengangkutan ikan bagi kapal perikanan. Dengan berlakunya Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 21 Tahun 2011 tentang Pembebasan Retribusi Izin Usaha Perikanan maka potensi pendapatan dari retribusi Jasa umum berkurang dan ditiadakan. Hal ini seiring dengan Misi Pemerintah Provinsi Jawa Timur : Misi : *Mewujudkan Makmur bersama Wong Cilik melalui APBD untuk Rakyat.*

Retribusi Jasa Usaha berasal dari Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah berupa pelayanan Jasa Laboratorium serta pemakaian lahan, bangunan, peralatan, lain-lain asset di

seluruh UPT Dinas Perikanan Dan Kelautan Provinsi Jawa Timur. Disamping itu berasal Dari Retribusi Penjualan Produksi Daerah yaitu berupa Penjualan Benih Ikan dan Udang.

Disamping Retribusi Daerah terdapat pula Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah yaitu berasal dari Pendapatan sewa gedung dan bangunan serta pendapatan atas penerimaan jasa bagi hasil kontribusi dana bergulir. Adapun target pendapatan sebesar tahun 2011 semula sebesar Rp 11.175.000.000,- mengalami Perubahan menjadi sebesar Rp 11.304.316.000,- dengan realisasi tahun 2011 sebesar Rp 14.708.444.654,27,-. Adapun realisasi sebesar Rp 14.708.444.654,27,- (130,11 %), turun dari tahun sebelumnya dari target sebesar Rp 11.309.500.000,- dengan realisasi Rp 15.854.116.743,- (140,18 %).

2. Belanja

Alokasi belanja diarahkan untuk :

- a. Pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar masyarakat sesuai kemampuan dan khususnya bidang pendidikan diupayakan minimal 20%
- b. Stimulasi pertumbuhan ekonomi di sektor riil
- c. Fasilitasi penanganan bencana alam
- d. Mengakomodasi perkembangan dinamika masyarakat dan tidak terkonsentrasi pada fokus tertentu
- e. Pemanfaatan belanja didasarkan pada konsep integrasi Kebijakan Pusat, Provinsi dan Kabupaten / Kota
- f. Pemenuhan belanja langsung SKPD untuk optimalisasi pelayanan publik

Pagu belanja Dinas Perikanan Dan Kelautan Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 sebesar Rp 233.191.564.756,- mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya (2010) sebesar Rp 195.059.577.032,- atau sebesar 19.55 %, dengan Realisasi belanja sebesar Rp 213.258.819.552,55 (91,45 %).

2.3. Indikator pencapaian target kinerja APBD

Sesuai arah kebijakan pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam RPJMD Tahun 2010 – 2014 dari 9 (sembilan) agenda yang terkait adalah agenda Perluasan lapangan kerja, efektivitas Taskin, dan memberdayakan ekonomi rakyat terutama wong cilik ; Percepatan pertumbuhan ekonomi (berkualitas dan berkelanjutan) melalui pengembangan agroindustri / agrobisnis serta pembangunan / penyediaan infrastruktur pertanian dan pedesaan ; Pemeliharaan kualitas dan fungsi lingkungan hidup, perbaikan pengelolaan SDA dan penataan ruang dan Reformasi birokrasi dan pelayanan publik (prima). Sedangkan dari 18 program prioritas yang ditindaklanjuti adalah Revitalisasi Pertanian dan Pengembangan Agroindustri/Agrobisnis ; Peningkatan Investasi, Ekspor Non-Migas, dan Pariwisata ; Pemeliharaan Kualitas dan Fungsi Lingkungan Hidup, serta Perbaikan Pengelolaan Sumber Daya Alam, dan Penataan Ruang ; Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, dan Peningkatan Pelayanan Publik, maka dari itu arah kebijakan Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur diimplementasikan sebagai berikut :

- a. Pengembangan Perikanan Budidaya
- b. Pengembangan Perikanan Tangkap
- c. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
- d. Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pengawasan
- e. Reformasi birokrasi dan pelayanan publik

Dengan arah kebijakan seperti tersebut diatas, maka dampak yang menjadi harapan adalah Percepatan pertumbuhan ekonomi (berkualitas dan berkelanjutan) melalui pengembangan agroindustri / agrobisnis serta pembangunan / penyediaan infrastruktur. Dampak yang lain adalah perluasan lapangan kerja dan peningkatan efektivitas penanggulangan kemiskinan.

Indikator Kinerja per Program/Kegiatan dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Indikator Kinerja per Program/Kegiatan

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian target kinerja per tahun (%)
1	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik		
	- Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatkan pelayanan publik	80,00
2	Program Pengembangan Agroindustri/Agrobisnis		
	- Pengamanan (safeguarding) Perikanan	Fasilitasi pengembangan usaha agrobisnis bidang perikanan dan kelautan hulu dan hilir	38,00
3	Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir		
	- Pengelolaan Jasa Lingkungan dan Kelautan	Peningkatan jumlah kelompok masyarakat pengelola lingkungan dan jasa kelautan	25,00
	- Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Akses permodalan koperasi LEPPM3 Meningkat	25,00
	- Pembinaan Hukum dan Legislasi Bidang Pesisir dan P2K	Jumlah Kabupaten/Kota yang mempunyai peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil	25,00
	- Perencanaan dan Pengelolaan Pesisir dan Lautan Terpadu	Tersusunnya dokumen perencanaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil	25,00
	- Mitigasi dan Adaptasi terhadap Perubahan Iklim, Bencana dan Pencemaran	Meminimalisir prosentase korban jiwa dan kerugian material terhadap bencana	20,00
	- Pengembangan Kawasan Konservasi Laut, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	Meningkatkan pendapatan masyarakat pesisir dan meningkatkan jumlah kawasan konservasi yang dikelola secara berkelanjutan	25,00
	- Penguatan Kelembagaan dan Akreditasi Program Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	Terbinanya mitra kerjasama dengan dua lembaga dan 300 tenaga ahli tersertifikasi	20,00
	- Pengembangan Basis Data Spasial dan Informasi Sumberdaya Pesisir dan Pulau-pulau kecil	Pendataan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil	10,00
	- Peningkatan ops SPDN di	Beroperasinya SPDN di 13	20,00

	sentra-sentra nelayan	Kabupaten/Kota sebanyak 30 unit	
	- Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam rangka Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	Peningkatan pengetahuan pengelolaan wilayah pesisir	20,00
	- Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam rangka Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan	Peningkatan Kelompok Masyarakat Pengawas di wilayah pesisir	20,00
	- Peningkatan Sarana, Prasarana dan Operasional serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengawasan	Peningkatan penataan dan peran serta masyarakat pesisir dalam pengelolaan wilayah pesisir dan laut secara berkelanjutan dan mensejahterakan masyarakat	20,00
	- Peningkatan Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Perikanan dan Kelautan Guna Penataan dan Penegakan Hukum	Peningkatan Kelompok Masyarakat Pengawas di wilayah pesisir	20,00
	- Pengembangan Sistem Pengawasan Berbasis Masyarakat (SISWASMAS)	Peningkatan komunikasi sistem pengawasan masyarakat	20,00
	- Jalinkesra Penanganan Rumah Tangga Sangat Miskin di wilayah Pesisir	Menurunnya tingkat kemiskinan, meningkatkan pendapatan dan produktivitas masyarakat sangat miskin	20,00
4	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah		
	- Penyusunan Database SKPD sebagai Penunjang Pusat Data Provinsi Jawa Timur	Peningkatan pelayanan publik	20,00
5	Program Pengembangan Budidaya Perikanan		
	- Penerapan Good Agriculture Practices (GAP), Good Hatchery Practices (GHP) dan sistem jaminan mutu berdasarkan Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) Budidaya	Bertambahnya jumlah unit usaha yang bersertifikat sebanyak 20 unit per tahun	20,00
	- Pengembangan Kawasan Perikanan Budidaya	Peningkatan produksi ikan di kawasan budidaya laut, air tawar dan payau	20,00
	- Pengembangan Induk dan	Meningkatnya Jumlah	6,43

	Benih Unggul Perikanan Budidaya	Benih Di UPR, BBI Dan Kabupaten/ Kota	
	- Penanggulangan Hama Penyakit Ikan, Pengendalian Obat Ikan serta Monitoring Residu Obat, Bahan Kimia dan Pencemaran/Kontaminan pada Perikanan Budidaya	Prevalensi penyakit utama ikan yang dapat dikendalikan	20,00
	- Optimalisasi UPTD Bidang Perikanan dan Prasarana Budidaya	Tersedianya ikan dan benih di UPT dan di kawasan pengembangan budidaya	25,00
	- Revitalisasi Perikanan Budidaya	Mendorong upaya pengembangan kawasan dan sentra budidaya untuk menjembatani akses kemitraan pembudidaya ke stakeholder yang lain sehingga berkembangnya desa mandiri pangan dan pakan alternatif	20,00
	- Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam rangka Revitalisasi Perikanan Budidaya	Meningkatnya SDM perikanan budidaya di UPT dan Kabupaten/Kota	10,00
	- Pengembangan Budidaya Air Payau	Berkembangnya kawasan budidaya air payau	20,00
	- Jalinkesra Penanganan Rumah Tangga Sangat Miskin Melalui Program Perikanan Budidaya	Peningkatan produksi perikanan budidaya untuk kesejahteraan RTSM	30,00
6	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan		
	- Penguatan kompetensi LPPM-HP dan Lembaga Sertifikasi	Peningkatan ekspor produk perikanan	25,00
	- Pengembangan informasi usaha dan investasi	Fasilitasi peluang usaha dan penyebaran informasi pembangunan pengolahan pemasaran	25,00
	- Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Usaha dan Pemasaran Hasil Perikanan	Fasilitasi sistem informasi jaringan distribusi dan promosi hasil perikanan sehingga data tentang peningkatan konsumsi ikan dapat terpantau	25,00
	- Peningkatan Mutu dan Pengembangan Pengolahan Hasil Perikanan	Fasilitas UMKM pengolahan dan bantuan sarana pengolahan sanitasi higiene dan jaminan mutu hasil perikanan berdampak pada berkurangnya kasus penolakan produk	25,00
	- Penguatan Kelembagaan dan Pemodalan UMKM	Peningkatan pengembangan usaha	25,00

	Perikanan		
	- Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan	Peningkatan keterampilan bagi aparat	25,00
	- Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam rangka Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Usaha dan Pemasaran Hasil Perikanan Dalam dan Luar Negeri	Peningkatan pengembangan usaha perikanan	25,00
	- Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam rangka Penguatan Kelembagaan dan Pemodalan UMKM Perikanan	Fasilitasi pembinaan kemitraan usaha, pengembangan usaha dan investasi sehingga tercukupinya pemodalan UMKM	25,00
	- Fasilitasi Sarana Pelayanan Usaha Pemasaran Hasil Perikanan	Peningkatan volume dan nilai ekspor serta peningkatan konsumsi ikan	25,00
	- Jalinkesra Penanganan Rumah Tangga Sangat Miskin Melalui Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Produk Hasil Perikanan	Meningkatnya kesejahteraan dan produktivitas masyarakat rumah tangga sangat miskin	25,00
7	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan		
	- Pelatihan Petani Ikan/Nelayan dalam rangka Peningkatan SDM	Peningkatan keterampilan nelayan / petani ikan	25,00
	- Pengadaan Alat Bantu Penyuluhan dan Sarana Operasional Penyuluh	Peningkatan keterampilan nelayan / petani ikan	25,00
	- Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam rangka Revitalisasi Penyuluhan Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan	Peningkatan keterampilan nelayan / petani ikan	25,00
8	Program Pengembangan Sumberdaya Perikanan Tangkap		
	- Pengembangan Tehnologi Perikanan Tangkap dan Operasional UPTD Tangkap	Meningkatnya pengelolaan sumber daya ikan	40,00
	- Revitalisasi perikanan tuna	Meningkatnya kualitas hasil tangkapan	20,00
	- Pembangunan dan Rehabilitasi Prasarana Perikanan (Pelabuhan Perikanan dan PPI) dan Peningkatan Sarana Perikanan Tangkap	Meningkatnya pelayanan dan pengelolaan pasca panen hasil penangkapan	25,00
	- Operasional UPT Bidang	Peningkatan produksi	25,00

	Tangkap (PPP/PPI) dalam Rangka Pelaksanaan SOP	perikanan tangkap dengan meningkatkan pelayanan prima di PPP/PPI	
	- Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumberdaya Ikan dan Rehabilitasi/Pemulihan SDI di WPP 712 (Laut Jawa) dan WPP 573 (Samudera Hindia Selatan Jawa)	Peningkatan produksi perikanan tangkap	25,00
	- Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap Skala Kecil dan Minapolitan di Jawa Timur	Peningkatan penghasilan masyarakat dan nelayan	20,00
	- Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Peningkatan SDM Nelayan, Wanita Nelayan dan Taruna Nelayan	Peningkatan produksi perikanan tangkap dengan melaksanakan pelatihan untuk peningkatan kemampuan nelayan	25,00
	- Restrukturisasi Armada Perikanan di Jawa Timur	Meningkatkan kualitas penangkapan ikan	25,00
	- Optimalisasi Fasilitas dan Operasional Pelabuhan Perikanan dan Pangkalan Pendaratan Ikan se Jawa Timur	Peningkatan pelayanan	25,00
	- Pengendalian dan Peningkatan Pelayanan Perijinan Usaha Pengembangan Jaringan	Peningkatan pelayanan dan ketertiban operasi penangkapan ikan	25,00
9	Program Pengembangan Kawasan Agropolitan		
	- Fasilitasi Pengembangan Kawasan Agropolitan Dibidang Budidaya Perikanan	Peningkatan potensi perikanan budidaya	20,00
	- Pembentukan dan Pengembangan Klaster Komoditas Perikanan Unggulan Berpotensi Ekspor	Peningkatan potensi perikanan budidaya	20,00
	- Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Pembudidaya Ikan/Nelayan di Kawasan Agropolitan	Peningkatan keterampilan pembudidaya ikan	25,00
10	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani		
	- Fasilitasi Program Anti Kemiskinan (APP) Bidang Perikanan	Peningkatan pendapatan	20,00

Dalam mewujudkan misi dan visi Dinas Perikanan Dan Kelautan Provinsi Jawa Timur mengacu pada Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ingin dicapai dalam kurun waktu 2010 – 2014 adalah sebagai berikut :

- a. Tersedianya data kelompok usaha masyarakat perikanan dan kelautan
- b. Tercapainya target produksi
- c. Tercapainya produk berkualitas sesuai standar mutu dari hulu sampai hilir
- d. Tercapainya target konsumsi makan ikan
- e. Meningkatnya Nilai Tukar Nelayan (NTN) dan Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)
- f. Terlaksananya Konservasi dan Rehabilitasi Sumberdaya Ikan (SDI)

Indikator Kinerja Utama dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Indikator Kinerja Utama Tahun 2011

NO.	Indikator Kinerja Utama	Target Th. 2011	%
1.	Jumlah kelompok usaha masyarakat perikanan dan kelautan	1.614,00	0.01
2.	Produksi Perikanan ❖ Perikanan tangkap (ton) ❖ Perikanan Budidaya (ton) ❖ Garam (ton)	358.305,27 484.037,00 864.760,00	3.00 4.05 7.29
3.	Ekspor : ❖ Volume (ton) ❖ Nilai (Juta U\$)	249.478,95 707,33	2.09 0.01
4.	Konsumsi ikan (kg/kap/tahun)	19,08	0.00
5.	Nilai Tukar Nelayan/pembudidaya ikan	106,00	0.00
6.	Kelestarian Lingkungan (Rehabilitasi & Konservasi) a. Mangrove (Ha)* b. Terumbu Karang (Ha)* c. Restocking ikan di PUD (ekor) d. Restocking ikan di Laut (ekor)	268,00 110,00 5.500.000,00 4.495.500,00	0,00 0,00 46.00 37.60
		11.954.905,63	100.00

Rencana Strategis Dinas Perikanan Dan Kelautan Provinsi Jawa Timur merupakan acuan didalam penetapan target kinerja menengah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, dan tentunya dengan mengoptimalkan potensi-potensi yang ada.

Pengukuran target kinerja dalam penyelenggaraan program kegiatan tahun 2011, ditetapkan dalam matriks pengukuran kinerja pembangunan terhadap 6 (enam) Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perikanan Dan Kelautan Provinsi Jawa Timur, matriks selengkapnya adalah sebagai berikut :

Target Indikator Kinerja Utama (IKU) tersebut, oleh Dinas Perikanan Dan Kelautan Provinsi Jawa Timur diimplementasikan kedalam agenda program dan kegiatan sebagai berikut:

1. Program Pengembangan Perikanan Budidaya

a. Pengelolaan Produksi Perikanan Budidaya

Kegiatan yang dilaksanakan adalah :

- Pengembangan Perikanan Budidaya Air Payau
- Pelaksanaan GAP (Good Agriculture Practices), GHP (Good Handling Practices) serta pelaksanaan sertifikasi mutu bidang perikanan budidaya berdasarkan konsep HACCP (Hazard Analytic Critical Control Point)
- Pengembangan induk dan benih unggul
- Pengembangan kawasan perikanan budidaya
- Revitalisasi perikanan budidaya

b. Pengelolaan Prasarana dan Sarana Perikanan Budidaya

Kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut :

- Peningkatan prasarana dan sarana di UPTD dan kawasan pengembangan perikanan budidaya
- Pemberdayaan kelompok masyarakat pembudidaya / pembenih ikan
- Identifikasi, Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi kebutuhan dan peredaran sarana budidaya

c. Pengelolaan Kesehatan Ikan Budidaya dan Lingkungan

Kegiatan yang dilaksanakan adalah :

- Penanggulangan Hama dan Penyakit Ikan dan Kesehatan Lingkungan Perikanan Budidaya
- Pengendalian obat dan residu pada perikanan budidaya

- Pelestarian sumberdaya ikan

d. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Budidaya Air Payau

Kegiatan yang dilaksanakan adalah :

- Pengembangan Teknologi
- Peningkatan Pengelolaan Operasional Budidaya / Pembenihan
- Peningkatan Sumberdaya Manusia

e. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Budidaya Air Tawar

Kegiatan yang dilaksanakan adalah :

- Pengembangan Teknologi
- Peningkatan Pengelolaan Operasional Budidaya / Pembenihan
- Peningkatan Sumberdaya Manusia

2. Program Pengembangan Perikanan Tangkap

a. Fasilitasi Eksploitasi dan Aplikasi Teknologi Perikanan Tangkap

Kegiatan yang dilaksanakan adalah :

- Pengelolaan Sumberdaya Ikan
- Peningkatan SDM nelayan
- Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan
- Penguatan Kelembagaan dan Permodalan kelompok nelayan dan keluarganya
- Penerapan alat tangkap dan alat bantu penangkapan ikan yang produktif dan ramah lingkungan
- Penerapan GHdP dan Sertifikasi Hasil Penangkapan Ikan (SHTI)
- Fasilitasi sertifikasi kapal penangkapan ikan

b. Pengelolaan Operasional Pelabuhan

Kegiatan yang dilaksanakan adalah :

- Sanitasi dan higiene di PP / PPI
- Penerapan Log BOOK dan pendataan hasil tangkapan ikan
- Peningkatan kemampuan SDM di PP / PPI
- Sertifikasi pengawakan kapal dan nelayan

- Fasilitasi sertifikasi Tempat Pendaratan Ikan
- Peningkatan pelayanan jasa di PP / PPI
- Pemeliharaan dan perbaikan sarana dan prasarana PP / PPI
- Pembinaan teknis bagi pengguna jasa di PP / PPI
- Fasilitasi Pusat Informasi Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan

c. Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap

Kegiatan yang dilaksanakan adalah :

- Pembangunan / pengembangan dan rehabilitasi pelabuhan perikanan / PPI
- Fasilitasi pengembangan PPI di Kabupaten / Kota
- Restrukturisasi armada perikanan tangkap
- Pengembangan dan fasilitasi alat tangkap dan alat bantu penangkapan di Kab / Kota

d. Pendidikan Kemasyarakatan Produktif bagi Nelayan dan Taruna Nelayan

Kegiatan yang dilaksanakan adalah :

- Pelaksanaan kaji terap pengembangan teknologi penangkapan ikan
- Pendidikan dan latihan ketrampilan teknis bagi nelayan dan petugas teknis lapangan di Kab / Kota
- Pelayanan informasi teknologi dan pelatihan teknis penangkapan ikan

3. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

a. Pengembangan Pengolahan dan Jaminan Mutu Hasil Perikanan

Kegiatan yang dilaksanakan adalah :

- Pengembangan produk olahan
- Jaminan mutu hasil perikanan

b. Pengembangan Usaha Perikanan dan Kelautan

Kegiatan yang dilaksanakan adalah :

- Fasilitasi usaha perikanan dan kelautan
- Fasilitasi investasi perikanan dan kelautan
- Fasilitasi permodalan perikanan dan kelautan
- Fasilitasi peningkatan kinerja penyuluh perikanan dan kelautan
- Fasilitasi kelembagaan dan informasi usaha

c. Penguatan dan Pengembangan Pemasaran Produk Dalam dan Luar Negeri

Kegiatan yang dilaksanakan adalah :

- Peningkatan konsumsi ikan
- Pemenuhan kebutuhan pasar dalam negeri
- Peningkatan ekspor produk hasil perikanan

d. Penguatan Kompetensi Pengendalian, Pengujian dan Sertifikasi Mutu Hasil Perikanan serta Pengembangan Teknologi Terapan

Kegiatan yang dilaksanakan adalah :

- Pengendalian mutu hasil perikanan
- Pengujian mutu hasil perikanan
- Sertifikasi mutu hasil perikanan
- Pengembangan teknologi terapan

4. Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

a. Pengelolaan Kelautan Pesisir dan Pengawasan

Kegiatan yang dilaksanakan adalah :

- Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP)
- Pengelolaan lingkungan dan jasa kelautan
- Perencanaan dan Penataan Ruang Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
- Mitigasi dan adaptasi bencana, pencemaran dan dampak perubahan iklim
- Rehabilitasi dan Konservasi Ekosistem dan Sumberdaya Ikan di Laut, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
- Pengembangan basis data spasial dan informasi sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil

- Penguatan kelembagaan dan akreditasi program pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil
- Pengembangan dan pembinaan legislasi pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil
- Peningkatan operasional SPDN

b. Pengelolaan Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Perikanan dan Kelautan

Kegiatan yang dilaksanakan adalah :

- Peningkatan operasional pengawasan Sumberdaya Perikanan dan Kelautan
- Peningkatan penataan dan penegakan hukum
- Penguatan kelembagaan masyarakat pengawas sumberdaya perikanan dan kelautan (POKMASWAS)
- Peningkatan sarana dan prasarana pengawasan sumberdaya perikanan dan kelautan

5. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik

a. Pengembangan dan Pengelolaan Program Pembangunan Perikanan dan Kelautan

Kegiatan yang dilaksanakan adalah :

- Perencanaan Pembangunan Perikanan dan Kelautan
- Monitoring dan Evaluasi hasil Pembangunan Perikanan dan Kelautan

6. Pengelolaan Pelayanan Prima

a. Penataan Pengelolaan Keuangan

Kegiatan yang dilaksanakan adalah :

- Pelaksanaan sistim administrasi pengelolaan keuangan
- Penataan dokumen keuangan

7. Penataan Pengelolaan Asset

Kegiatan yang dilaksanakan adalah :

- Pelaksanaan sistem administrasi pengelolaan barang
- Penataan dan pengamanan perlengkapan dinas

8. Penataan Pengelolaan Aparatur dan Umum

Kegiatan yang dilaksanakan adalah :

- a. Pengelolaan administrasi, tata naskah dinas
 - Pengelolaan Kepegawaian
 - Pengelolaan Perpustakaan dan kehumasan
 - Pengelolaan kerumahtanggaan dinas

BAB III Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Gambaran pencapaian secara umum, sasaran strategis pembangunan perikanan dan kelautan adalah melalui (1) meningkatnya kemampuan dan fasilitas usaha masyarakat perikanan dan kelautan (2) meningkatnya produksi dan produktivitas serta mutu produk perikanan dan kelautan (3) terciptanya sumberdaya perikanan dan kelautan yang lestari (4) meningkatnya pendapatan masyarakat perikanan serta konsumsi per kapita serta (5) terciptanya pemanfaatan wilayah pesisir secara terpadu dan berkelanjutan. Sasaran tersebut telah tercermin dalam Indikator Kinerja Utama (IKU).

Selanjutnya, mengenai capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2011 dapat kami sampaikan sebagai berikut :

1. Kelompok Usaha masyarakat bidang perikanan dan kelautan yang semula ditargetkan sebesar 1.614 kelompok ternyata sampai pada bulan Nopember dapat mencapai 2.185 kelompok (135,58%), sehingga telah melebihi target yang ditetapkan.
2. Produksi :
 - a. Pencapaian produksi budidaya s/d Nopember 2011 sebesar 624.506,60 ton (129,02%) dari target tahun 2011 sebesar 484.037 ton.
 - b. Capaian produksi perikanan tangkap sampai Nopember 2011 sebesar 195.747,10 ton atau 54,63 % dari target tahun 2011 sebesar 358.305,27 ton. Rendahnya capaian produksi ini antara lain disebabkan oleh faktor anomali iklim dan overfishing di wilayah Pantura.
 - c. Produksi garam Jawa Timur tahun 2011 sebesar 567.059,08 ton atau 65,57% dari target sebesar 864.760 ton. Target tersebut tidak

dapat dicapai dikarenakan faktor anomali iklim, sedangkan lokasi yang berpotensi garam adalah Tuban, Lamongan, Pasuruan, Kota Pasuruan, Gresik, Probolinggo, Kota Surabaya, Pamekasan, Sampang, Sumenep, Bangkalan.

3. Tercapainya volume ekspor hasil perikanan sebesar 160 ribu ton sampai bulan Agustus 2011 (64,25 %) dengan nilai 531 juta US\$ (77,6 %) dari target yang telah ditentukan. Apabila dibandingkan dengan bulan yang sama tahun 2010 masih mengalami kenaikan sebesar 19%.
4. Konsumsi ikan tahun 2009 sebesar 17,3 Kg/kapita/tahun, tahun 2010 menjadi 19,2 Kg/kapita/tahun. Sedangkan tahun 2011 hingga triwulan III mencapai 20,11 Kg/kapita/tahun. Meningkatnya konsumsi ikan disebabkan karena telah terbentuknya Forum Peningkatan Konsumsi Ikan Nasional (Forikan) disertai kegiatan promosi makan ikan di seluruh Kabupaten/ Kota se Jawa Timur.
5. Nilai Tukar Nelayan (NTN) Tahun 2009 – 2010 mengalami kenaikan dari 143,11 menjadi 143,19. Sedangkan Tahun 2011 sampai bulan Nopember mencapai 148,65 %. Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) mengalami kenaikan dari Tahun 2009 sebesar 101,07 Tahun 2010 menjadi 101,75. Sedang Tahun 2011 sampai dengan bulan Nopember baru mencapai 101,68.
6. Pelestarian Sumberdaya Ikan (SDI) :
 - a. Realisasi Rehabilitasi Ekosistem Mangrove seluas 268 Ha di 8 Kabupaten/Kota yaitu Banyuwangi, Kota Pasuruan, Probolinggo, Surabaya, Sidoarjo, Blitar, Lumajang, Pacitan.
 - b. Realisasi Rehabilitasi Ekosistem Terumbu Karang seluas 110 Ha di 4 Kabupaten di Wilayah Madura
 - c. Kegiatan restocking dengan penebaran benih ikan sebanyak 5,3 juta ekor telah terlaksana 100%, di 42 waduk/ranu/sungai yang

tersebar di 14 Kabupaten yaitu Kabupaten Banyuwangi, Blitar, Probolinggo, Pasuruan, Bondowoso, Ngawi, Bojonegoro, Magetan, Tuban, Mojokerto, Jember, Malang, Sampang dan Nganjuk.

- d. Kegiatan pemulihan Sumber Daya Ikan dengan penebaran benih bandeng (nener) sebanyak 750 ribu ekor dan benih udang (benur) sebanyak 1 juta ekor di Kabupaten Banyuwangi dan Pacitan, rencana pelaksanaannya pada bulan Nopember 2011.
- e. Dalam rangka pengawasan dan pengendalian Sumber Daya Ikan telah dibentuk POKMASWAS sebanyak 134 kelompok dari target 110 kelompok atau sebesar 121,81% di 19 Kab/Kota yaitu di seluruh wilayah pesisir kecuali Tuban, Sampang dan Bangkalan.

3.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

Dalam mewujudkan capaian Indikator Kinerja Utama diwujudkan kedalam Program dan Kegiatan meliputi : (1) Program Pengembangan Agroindustri / Agrobisnis. (2) Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan (3) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (4) Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir. (5) Program Pengembangan Budidaya Perikanan (6) Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan (7) Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan (8) Program Pengembangan Sumberdaya Perikanan Tangkap (9) Program Pengembangan Kawasan Agropolitan (10) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani.

Mayoritas program dan kegiatan telah dilaksanakan sesuai rencana kegiatan dan rencana capaian. Namun ada permasalahan terkait dengan capaian pelaksanaan Program :

- a. Program Pengembangan Agroindustri / Agrobisnis.
- b. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan
- c. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
- d. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir

Tujuan program adalah mewujudkan pengelolaan sumberdaya perikanan dan kelautan yang lestari dan berkelanjutan melalui rehabilitasi mangrove dan terumbu karang serta meningkatkan produksi garam rakyat (Pugar). Sasaran program terbentuknya kawasan konservasi mangrove seluas 268 Ha, Terumbu Karang 110 Ha serta tercapainya produksi garam 864.760 ton

Permasalahan :

- o Adanya sebagian masyarakat yang masih menggunakan bahan berbahaya dan alat tangkap terlarang (trawl)



- o Adanya penebangan mangrove dan pengrusakan terumbu karang

- o Adanya penggunaan bahan berbahaya (formalin) pada unit pengolah ikan terutama tradisional



- Pelanggaran jalur penangkapan ikan dan perebutan fishing ground
- Belum akuratnya informasi tentang data dan potensi garam di setiap Kabupaten / Kota. Dokumen RTRW Kabupaten/Kota belum di Perda kan.
- Status kepemilikan dan penyewa tambak garam menyulitkan penyaluran Bantuan Langsung Program Pugar ke masyarakat
- Kebutuhan riil revitalisasi Pugar melebihi nominal yang ditentukan sebesar 5 juta rupiah, berakibat menghambat proses administrasi dan teknis di lapangan
- Adanya peraturan yang sering berubah, mengakibatkan proses terhambat serta terbatasnya informasi data Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
- Alokasi dana pendamping kurang proporsional di setiap Kabupaten/Kota serta minimnya kelembagaan untuk mendukung program/kegiatan
- Faktor iklim yang kurang mendukung dan sistem pelaporan kurang kontinyu

e. Program Pengembangan Perikanan Budidaya :

Tujuan program meningkatkan produksi perikanan budidaya (kolam, tambak, sawah tambak, jaring apung, karamba, mina padi, budidaya laut dan budidaya ikan hias) yang ditempuh melalui serangkaian kegiatan perikanan budidaya. Sasaran program tercapainya produksi perikanan budidaya sebesar 484.037 ton tahun 2011

Permasalahan :

- Penurunan kualitas dan kuantitas benih / induk ikan, terutama yang bernilai ekonomis tinggi
- Harga pakan pabrikan tinggi menyebabkan biaya produksi tinggi
- Status kelembagaan UPTD masih belum mapan (belum eselon)

f. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan

Tujuan program adalah meningkatkan ekspor hasil perikanan dan kelautan serta konsumsi ikan dengan sasaran tercapainya ekspor hasil perikanan dan kelautan sebesar 249 ribu ton dengan nilai 685 juta US\$

Permasalahan :

- Keterbatasan bahan baku ikan untuk mencukupi kebutuhan industri pengolahan di Jawa Timur
- Semakin ketatnya aturan mutu produk perikanan negara-negara pengimpor hasil perikanan
- Anomali iklim yang menyebabkan kelangkaan bahan baku ikan, mengganggu kestabilan pasokan kebutuhan ikan untuk pasar dalam negeri, yang menyebabkan pengolah skala kecil menghentikan usahanya
- Rendahnya pendapatan masyarakat yang menyebabkan kemampuan masyarakat mengkonsumsi ikan masih rendah

- o Margin keuntungan pengolah dan pemasar produk perikanan sangat rendah dibawah bunga Bank, menyebabkan sulit mengakses permodalan kepada perbankan dan lembaga keuangan

- o Kualitas produk yang dihasilkan pengolah dan pemasaran masih belum sepenuhnya memenuhi standar keamanan pangan



g. Program Pengembangan Perikanan Tangkap

Tujuan Program meningkatkan produksi perikanan tangkap (laut dan perairan umum) yang ditempuh melalui serangkaian kegiatan perikanan tangkap. Sasaran program tercapainya produksi perikanan tangkap sebesar 358,305 ton dengan Nilai Tukar Nelayan (NTN) sebesar 106

Permasalahan :

- o Anomali cuaca yang berkepanjangan mengakibatkan paceklik,



ikan hanya keluar sebentar. Sekitar bulan September sampai Desember 2011 cenderung menurun

h. Program Pengembangan Penyuluh Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan

Tujuan program meningkatkan kinerja penyuluh agar dapat berperan dan berfungsi sebagai agen perubahan untuk

memfasilitasi proses pembelajaran bagi pelaku utama dan pelaku usaha perikanan. Sasaran meningkatkan kinerja penyuluh untuk dapat mempengaruhi sasaran (pelaku usaha perikanan) agar perilaku berubah guna memperbaiki mutu hidup. Antara lain melalui pelatihan 185 orang penyuluh, bantuan sarana penyuluh 250 orang, biaya operasional penyuluh 177 orang.

Permasalahan :

- o Sistem penyuluhan perikanan dan kelautan masih merupakan hal baru, maka kelengkapan perangkat masih sangat kurang sesuai dengan peraturan yang ada berdasar Undang-Undang No. 16 Tahun 2006 tentang sistem penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan dimana di Tingkat Provinsi sudah berbentuk Badan Koordinasi Penyuluhan.
- o Masih diperlukan sinergitas sistem penyuluhan perikanan dan kelautan dari tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten/ Kota untuk mendukung pembangunan perikanan dan kelautan

i. Program Pengembangan Kawasan Agropolitan

Tujuan program meningkatkan produksi perikanan unggulan ekspor di kawasan agropolitan melalui pemberian fasilitasi budidaya ikan dengan sasaran terbentuknya klaster komoditas perikanan berpotensi ekspor di 6 lokasi

Permasalahan :

- Tidak semua lokasi agropolitan cocok untuk budidaya ikan
- Baru 6 (enam) Kabupaten rintisan agropolitan dan belum semua tenaga terampil
- Masih minimnya jumlah pembudidaya ikan di kawasan agropolitan
- Masih rendahnya pengetahuan teknis kualitas SDM
- Masih minimnya akses ekonomi di lokasi agropolitan

j. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

Tujuan meningkatnya kesejahteraan pembudidaya ikan dengan sasaran terlaksananya penyerahan paket budidaya kolam sebanyak 8 paket yang masing-masing paket terdiri dari 5 unit kolam dan 5 unit sarana budidaya ikan berupa benih, pakan, obat dan peralatan.

Permasalahan :

- Sumberdaya manusia kelompok masyarakat APP bidang perikanan dan kelautan tergolong rendah dimana anggotanya masih memiliki pengetahuan dan ketrampilan yang terbatas sehingga belum mandiri dalam mengatasi permasalahan teknis yang dihadapi seperti kematian benih, penyakit, pengelolaan media budidaya dan pertumbuhan ikan yang tidak seragam
- Keterbatasan modal dalam pengadaan pakan ikan pabrikan yang harganya cenderung semakin mahal

- Fluktuasi harga ikan yang diterima di tingkat pembudidaya (Pokmas) sering tidak menguntungkan sehingga nilai manfaat yang diterima rendah

BAB IV Kebijakan Akuntansi

4.1. Entitas pelaporan keuangan daerah

Penyelenggaraan akuntansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur ada 2 (dua) entitas, yaitu entitas pelaporan dan entitas akuntansi, yang mempunyai pengertian sebagai berikut :

- a. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan daerah yang terdiri satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut peraturan perundangan-undangan wajib menyampaikan laporan keuangan. Entitas pelaporan adalah pemerintah daerah atau satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah atau organisasi lainnya jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan. Entitas pelaporan di Provinsi Jawa Timur adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur
- b. Entitas akuntansi adalah unit akuntansi Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Dinas Perikanan Dan Kelautan Provinsi Jawa Timur adalah salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dibawah lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Timur. sebagai unit entitas akuntansi yang wajib menyelenggarakan Laporan Keuangan

Guna meningkatkan akurasi dan validitas laporan keuangan, SKPD sebagai entitas akuntansi melakukan rekonsiliasi dengan PPKD selaku entitas pelaporan, untuk selanjutnya disusun laporan keuangan yang memenuhi standar sesuai ketentuan yang berlaku.

Laporan keuangan SKPD menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, neraca,

arus kas, dan kinerja keuangan yang dilengkapi data-data selama periode pelaporan.

Sebagai entitas pelaporan maka Laporan Keuangan yang disusun oleh SKPD (Dinas Perikanan Dan Kelautan Provinsi Jawa Timur) terdiri dari :

1. Laporan Realisasi APBD

Laporan realisasi (LRA) APBD terdiri dari Realisasi Pendapatan dan Belanja disusun dengan menggunakan Sistem Akuntansi berbasis Kas

Angka Realisasi Pendapatan APBD Tahun 2011 berdasarkan penerimaan kas yang dikelola oleh Bendahara Penerimaan SKPD dan seluruh penerimaan yang ada masuk ke rekening Kas Daerah dan dilaporkan secara periodik setiap bulan kepada BPKAD

Angka realisasi belanja daerah disajikan pada Laporan Realisasi Belanja APBD TA 2011, menjadi tanggung jawab penuh Pengguna Anggaran atas semua pengeluaran yang dibelanjakannya.

2. Neraca

Neraca disusun berdasarkan kompilasi data Kas Pendapatan di Bendahara Penerimaan dan Kas belanja di Bendahara Pengeluaran, data Persediaan dan investasi aset di Bendahara Penerimaan serta Penyimpan Barang

3. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) merupakan penjelasan naratif atau angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Neraca. Catatan atas Laporan Keuangan juga berisi tentang kebijakan akuntansi yang

dipergunakan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

Disamping unsur-unsur keuangan yang pokok, sebagaimana yang telah diungkapkan, maka laporan keuangan dilengkapi informasi penting lainnya dalam rangka pengungkapan yang memadai.

4.2. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan

Laporan realisasi APBD disusun dengan menggunakan Basis Kas yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara diterima pada Kas Umum Daerah.

Penyajian aset, kewajiban dan ekuitas dana dalam neraca berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari BUD.

Penyusunan laporan keuangan Dinas Perikanan Daerah Provinsi Jawa Timur telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang SAP. Penyusunan laporan keuangan

4.3. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan

Unsur-unsur laporan keuangan yang menjelaskan pengertian dan ruang lingkup dari pos-pos yang membentuk laporan keuangan, memenuhi kriteria minimum suatu kegiatan untuk diakui, yaitu :

- a. Terdapat kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan kegiatan akan mengalir keluar dari atau masuk kedalam entitas akuntansi.
- b. Kegiatan tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur atau dapat diestimasi dengan andal

Keandalan pengukuran didasarkan pada nilai uang akibat suatu kegiatan. Namun ada kalanya pengukuran didasarkan pada hasil estimasi yang layak. Apabila pengukuran berdasar kedua hal tersebut tidak mungkin dilakukan, maka pengakuan transaksi diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan.

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos kedalam laporan keuangan. Pada dasarnya pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis.

Koreksi kesalahan

Laporan keuangan disusun dan disajikan untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan. Untuk menjaga integritas data dan agar informasi laporan keuangan tidak menyesatkan maka laporan keuangan ini harus bebas dari kesalahan.

Kesalahan adalah penyajian akun-akun yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan sebelum laporan keuangan ditetapkan oleh Peraturan Daerah atau periode akuntansi sebelumnya dimana laporan sudah ditetapkan oleh Peraturan Daerah

Peristiwa luar biasa adalah kejadian atau transaksi yang secara jelas berbeda dengan kegiatan entitas. Hal tersebut tidak

diharapkan dan diluar kendali sehingga berdampak signifikan terhadap realisasi anggaran atau posisi aset / kewajiban

Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Dinas Perikanan Dan Kelautan Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 adalah :

a. Pendapatan

Pendapatan adalah semua penerimaan Kas Daerah yang menambah ekuitas dana dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Akuntansi Pendapatan dilaksanakan berdasarkan asas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto. Tidak mencatat netonya. Pendapatan disajikan sesuai dengan jenis pendapatannya.

b. Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran kas daerah yang mengurangi ekuitas dana dalam periode tahun anggaran bersangkutan. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas daerah. Pengeluaran melalui Belanja Pengeluaran maka pengakuan belanja terjadi saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh fungsi perbendaharaan (BUD). Belanja disajikan dimuka laporan menurut klasifikasi ekonomi / jenis belanja, sedangkan di Catatan atas Laporan Keuangan, belanja disajikan menurut organisasi dan fungsi.

Pengeluaran Kas atas pencairan SP2D gaji diakui sebagai penambah belanja gaji. Pada saat dilakukan pertanggungjawaban atas pembayaran gaji pada tahun berjalan, bila terdapat kelebihan gaji yang disetor ke Kas Umum Daerah diakui sebagai pengurang belanja gaji.

Pengembalian gaji pada periode sebelumnya diakui sebagai pendapatan lain-lain.

Pengakuan Belanja Non Modal atau investasi dalam periode berjalan berdasarkan jumlah kas yang dikeluarkan. Pada akhir periode akuntansi, berdasarkan jumlah belanja non modal yang sampai akhir periode akuntansi telah menjadi kewajiban tetapi belum ada realisasi pengeluaran kas, maka diakui sebagai kewajiban kepada pihak ketiga.

Pengakuan Belanja Modal

Belanja Modal diakui dalam periode berjalan pada saat aset yang dibeli telah diterima dan hak kepemilikannya telah berpindah.

Belanja Modal peralatan dan mesin adalah jumlah pengeluaran untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan

Belanja modal gedung dan bangunan

Diakui sebesar harga perolehan gedung dan bangunan sampai siap untuk digunakan. Biaya perolehan meliputi harga pembelian atau konstruksi termasuk biaya pengurusan IMB, notaris dan pajak.

Biaya Modal jalan, irigasi dan jaringan diakui sebesar seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai.

Biaya administrasi dan biaya umum lainnya

Bukan merupakan komposisi biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan ke komponen aset, seperti biaya KPA, PPTK, Pelaksana kegiatan, biaya ATK untuk administrasi kegiatan dan lain-lain.

Biaya yang tidak termasuk kategori belanja modal adalah biaya permulaan dan biaya pra produksi kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke kondisi kerjanya. Contoh biaya permulaan atau pra produksi yang tidak termasuk dalam kategori belanja modal adalah biaya studi kelayakan.

Biaya yang dikeluarkan setelah aset tetap diperoleh yang memperpanjang masa manfaat ekonomik dimasa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja harus diakui sebagai belanja modal, bukan merupakan aktivitas pemeliharaan. Dengan kata lain biaya setelah perolehan aset tetap tersebut dikapitalisasi ke aset tetap yang bersangkutan.

Selisih Lebih Pembiayaan Anggaran

Dalam proses realisasi anggaran pada umumnya akan muncul SILPA. Jumlah ini merupakan selisih antara penerimaan anggaran dikurangi dengan pengeluaran anggaran. Dengan kata lain jumlah ini diperoleh dengan menjumlahkan surplus/ defisit dengan pembiayaan netto.

c. Aset

Adalah sumberdaya ekonomi yang dikuasai dan / atau dimiliki oleh sebagai akibat kegiatan masa lalu dan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang, serta dapat diukur dalam satuan

uang, termasuk sumberdaya non keuangan. Aset diakui pada saat diterima atau saat hak kepemilikan berpindah.

Aset lancar

Jika berupa kas atau setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai atau untuk dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar terdiri dari Kas, Piutang dan Persediaan.

Kas disajikan dineraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas di Bendahara Penerimaan yang belum disetor ke Kas BUD disajikan sebagai Kas di Bendahara Penerimaan.

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan Saldo Uang Persediaan (UP) yang belum disetor ke Kas BUD sampai dengan tanggal pelaporan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan / atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan dicatat dineraca berdasarkan :

- Harga pembelian terakhir apabila diperoleh dengan pembelian
- Harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri
- Harga wajar atau estimasi nilai penjualannya diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

Investasi Non Permanen

Seluruh dana Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang diperlukan dalam bentuk Pinjaman Dana Bergulir kepada pengusaha kecil, koperasi, anggota kelompok swadaya masyarakat dll.

Aset tetap

Adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Klasifikasi aset tetap adalah tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan serta aset tetap lainnya dan konstruksi dalam pengerjaan.

Peralatan dan mesin yang dikelompokkan kedalam aset tetap adalah peralatan dan mesin yang dimiliki atau dikuasai oleh Pemerintah untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum dan dalam kondisi siap digunakan. Klasifikasinya meliputi alat berat, alat angkutan, alat bengkel dan alat ukur, alat pertanian, alat kantor dan rumah tangga, alat studio, komunikasi dan pemancar, alat kedokteran dan kesehatan, alat laboratorium, komputer dan unit peralatan proses produksi.

Gedung dan Bangunan, yang dikelompokkan dalam aset ini adalah bangunan yang dimiliki atau dikuasai Pemerintah untuk digunakan kegiatan Pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum dalam kondisi siap digunakan. Contoh antara lain bangunan gedung, rambu-rambu, menara dll.

Jalan, irigasi, jaringan yang dikelompokkan dalam aset ini adalah bangunan yang dimiliki atau dikuasai Pemerintah untuk digunakan kegiatan Pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum dalam kondisi siap digunakan. Contoh antara lain jalan jembatan, bangunan air, instalasi dan jaringan.

Aset tetap lainnya mencakup kelompok yang tidak tergolong aset tetap di atas, tetapi memenuhi definisi aset tetap. Aset

tetap lainnya meliputi koleksi buku perpustakaan/buku dan barang bercorak seni/budaya/olah raga.

Belanja pemeliharaan dimaksudkan untuk mempertahankan kondisi asset tetap tersebut sesuai dengan kondisi awal. Belanja peningkatan dimaksudkan untuk memberi manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, masa manfaat, mutu produksi atau peningkatan standar kinerja.

Aset tak berwujud merupakan aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta untuk digunakan dalam menghasilkan barang dan jasa atau digunakan untuk tujuan lain termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset tetap tak berwujud meliputi Software computer, Lisensi dan franchise, Hak cipta (copyright), paten, goodwill dan hak lainnya, Hak jasa dan operasi.

4.4. Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintah

Berdasarkan Permendagri No. 13 tahun 2006 Laporan Keuangan Daerah disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Penerapan kebijakan akuntansi diterapkan secara bertahap yang berarti belum semua sesuai saran SAP.

Penerapan kebijakan akuntansi pendapatan

Penerapan kebijakan akuntansi Pendapatan telah mengacu pada SAP yaitu mengakui pendapatan pada saat kas dan setara kas diterima dan masuk ke rekening kas umum daerah dalam hal ini adalah rekening yang dikelola oleh Bagian Kas Daerah dan Pembelanjaan. Perlakuan terhadap koreksi atas transaksi pendapatan telah sesuai dengan SAP. Dalam hal ini pada Dinas

Periklanan tidak ada restitusi yang dapat mempengaruhi ekuitas dana.

Penerapan kebijakan akuntansi belanja

Penerapan kebijakan akuntansi Belanja juga telah mengacu pada SAP. Belanja diakui ketika terjadi pengeluaran dari rekening Kas Umum Daerah dan/atau rekening bendahara pengeluaran dan ketika belanja tersebut telah dinyatakan sah oleh pihak yang berwenang. Penyetoran atas pengembalian realisasi belanja ke rekening kas umum daerah pada tahun berkenaan diakui mengurangi realisasi belanja bersangkutan.

Kebijakan akuntansi atas belanja modal

Realisasi belanja modal berdasarkan prinsip harga perolehan, dan pada saat yang sama diakui menambah aset tetap pemerintah daerah. Dengan pertimbangan efisiensi maka pembayaran termin atas realisasi belanja modal diakui menambah aset Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Kebijakan akuntansi yang belum mengikuti Standar Akuntansi Pemerintah adalah kebijakan penyusutan aset tetap

Pemerintah Jawa Timur belum menetapkan kriteria dan metode penyusutan yang akan diberlakukan di seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), sehingga pelaporan aset untuk periode terakhir tahun 2011 masih disajikan sebesar harga perolehannya, dan belum dikurangi dengan penyusutan.

BAB V Penjelasan atas pos- pos Laporan Keuangan

5.1. Rincian dan penjelasan masing- masing pos-pos pelaporan keuangan

Penjelasan atas pos-pos Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Realisasi Anggaran Dinas Perikanan Dan Kelautan Provinsi Jawa Timur merupakan laporan yang menjelaskan ikhtisar sumber. Alokasi dan pemakaian sumberdaya ekonomi yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang menggambarkan perbandingan antara realisasi dan anggarannya dalam satu periode pelaporan. Dalam penjelasan LRA ini akan disajikan sesuai dengan struktur APBD kemudian dikonversi dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang meliputi Pendapatan dan Belanja.

5.1.1. Pendapatan

Realisasi pendapatan pada tahun 2011 sebesar Rp 14.708.444.654,27 (130,11%), apabila dibandingkan dengan target pendapatan sebesar Rp 11.304.316.000,- terdapat kelebihan realisasi sebesar Rp 3.404.128.654,27,-. Realisasi pendapatan tersebut diperoleh dari Retribusi Daerah dan Lain- lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.

Ikhtisar realisasi pendapatan sebagaimana tabel 3.

Tabel 3 . Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) TA 2011

No	URAIAN	TARGET Setelah PAPBD (Rp)	REALISASI (Rp)	Bertambah / berkurang
A	RETRIBUSI DAERAH			
1	Retribusi Jasa Umum			
a	Retribusi pengujian kapal perikanan	10.816.000,00	10.816.000,00	0
	-Pengujian kapal perikanan	2.871.000,00	2.871.000,00	0
	-Usaha penangkapan dan pengangkutan ikan	7.945.000,00	7.945.000,00	0
2	Retribusi Jasa Usaha			
a	Retribusi pemakaian kekayaan daerah	10.388.500.000,00	13.752.726.793,00	3.364.226.793,00
	-Pemakaian jasa laboratorium	9.938.500.000,00	12.969.673.142,00	3.031.173.142,00

	-Pemakaian lahan, bangunan, peralatan dan lain2 (MCK, es, air)	450.000.000,00	783.053.651,00	333.053.651,00
b	Retribusi penjualan produksi usaha daerah	875.000.000,00	876.636.170,00	1.636.170,00
	-Penjualan benih ikan dan udang	875.000.000,00	876.636.170,00	1.636.170,00
B	LAIN- LAIN PAD YANG SAH			
a	Pendapatan denda	-	29.864,00	29.864,00
	-Denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan	-	29.864,00	29.864,00
b	Pendapatan dari pengembalian	-	13.844.200,00	13.844.200,00
	-Pengembalian kelebihan pembayaran perjalanan dinas	-	8.216.000,00	8.216.000,00
	-Pengembalian kelebihan belanja lainnya	-	5.628.200,00	5.628.200,00
c	Pendapatan sewa	15.000.000,00	15.118.900,00	118.900,00
	-Sewa bangunan rumah dinas	15.000.000,00	15.118.900,00	118.900,00
d	Penerimaan lain- lain	15.000.000,00	39.272.727,27	24.272.727,27
	-Penerimaan jasa bagi hasil dana bergulir	15.000.000,00	39.272.727,27	24.272.727,27
	TOTAL	11.304.316.000,00	14.708.444.654,27	3.404.128.654,27

Retribusi daerah

Retribusi Daerah terdiri dari Retribusi Jasa Umum dan Retribusi Jasa Usaha. Retribusi jasa umum meliputi retribusi pengujian kapal perikanan dan ijin usaha penangkapan serta pengangkutan ikan. Target sebesar Rp 10.816.000,- dengan realisasi Rp 10.816.000,- (100%).

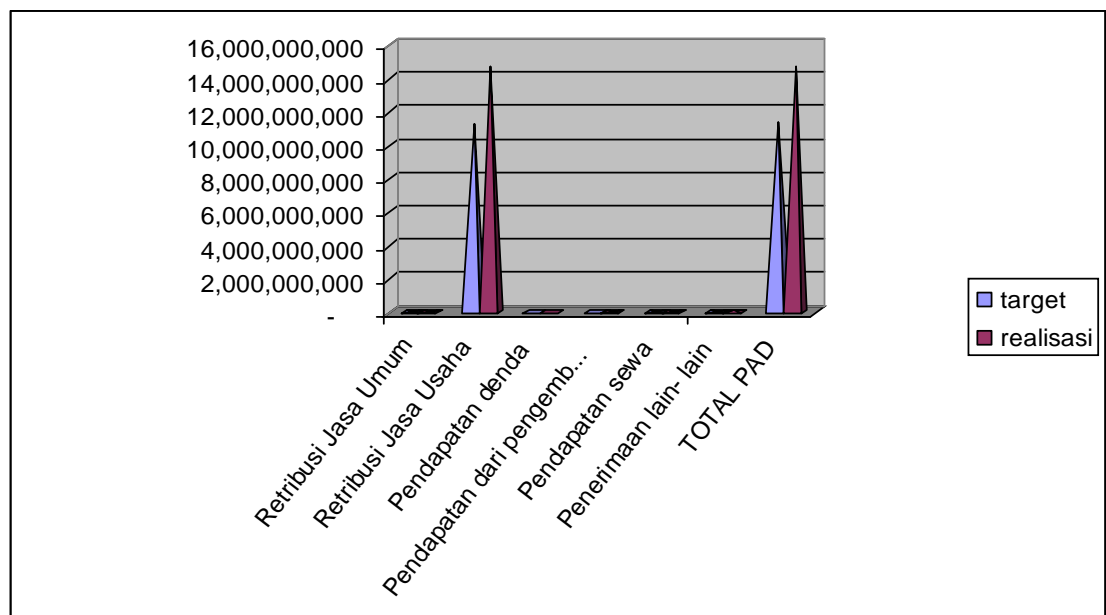
Retribusi jasa usaha meliputi retribusi pemakaian kekayaan daerah dan retribusi penjualan produksi usaha daerah. Retribusi pemakaian kekayaan daerah dengan target sebesar Rp 10.388.500.000,- dan realisasi sebesar Rp 13.752.726.793,- (132.38%) yaitu berupa pemakaian jasa laboratorium dengan target sebesar Rp 9.938.500.000,- sedangkan realisasi sebesar Rp 12.969.673.142,- Kelebihan realisasi disebabkan karena adanya kemudahan pelayanan sertifikasi serta penurunan tarif sertifikasi yang berdampak meningkatkan jumlah pelanggan sehingga ekspor

juga meningkat. Selain itu retribusi jasa usaha meliputi retribusi pemakaian lahan, bangunan, peralatan dan lain-lain seperti MCK, air dan jasa es yang berlokasi di 10 Unit Pelaksana Teknis bidang tangkap dengan target sebesar Rp 450.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp 783.053.651,-. Kelebihan realisasi berasal dari retribusi pemakaian bangunan TPI di Kabupaten Probolinggo, Pasuruan, Malang dan Pamekasan serta pemakaian bangunan di UPT dan gedung Provinsi.

Retribusi penjualan produksi usaha daerah berupa penjualan benih ikan dan udang dengan target sebesar Rp 875.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp 876.636.170,- (100,19%)

Komposisi realisasi pendapatan dapat dilihat pada grafik 1.

Grafik 1. Komposisi realisasi pendapatan TA 2011



Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, meliputi pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, pendapatan atas pengembalian kelebihan pembayaran perjalanan dinas, pendapatan atas kelebihan belanja lainnya, pendapatan sewa dan penerimaan lain-lain.

Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan realisasi sebesar Rp 29.864,-, Pendapatan atas pengembalian kelebihan pembayaran perjalanan dinas sebesar Rp 8.216.000,-,

Pendapatan atas kelebihan belanja lainnya sebesar Rp 5.628.200,- Pendapatan sewa berasal dari sewa bangunan rumah dinas target sebesar Rp 15.000.000,- realisasi sebesar Rp 15.118.900,- (100,79%) dan penerimaan lain-lain berasal dari bagi hasil kontribusi dana bergulir target sebesar Rp 15.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp 39.272.727,27 (261,82%). Terdapat kelebihan sebesar Rp 24.272.727,27 disebabkan adanya penambahan jumlah mitra usaha APP pada tahun 2010 sebanyak 26 mitra usaha menjadi 28 mitra usaha pada tahun 2011.

5.1.2. Belanja

Pagu belanja APBD Dinas Perikanan Dan Kelautan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp 233.191.564.756,- terealisasi sebesar Rp 213.258.819.552,55 (91,45%). Terdapat sisa anggaran sebesar Rp 19.932.745.203,45 (8,55%) disebabkan adanya penghematan, sisa lelang sebesar Rp 6.744.777.053,45 dan sisa yang tidak diserap sebesar Rp 10.718.280.000,- berupa restrukturisasi armada kapal perikanan Jawa Timur yang mengalami kegagalan dalam proses lelang (adanya sanggahan banding) sehingga waktu proses pengadaan tidak mencukupi. Sedangkan Jalinkesra penanganan RTSM di wilayah pesisir setor mati hasil lelang sebesar Rp 2.469.688.150,-.

Ikhtisar Realisasi Belanja dapat dilihat pada tabel 4

Tabel 4. Ikhtisar Realisasi Belanja

No	Program/ Kegiatan	Pagu setelah perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Bertambah / berkurang
1	Belanja Tidak Langsung	26.244.839.756,00	24.573.715.227,00	1.671.124.529,00
2	Program Pengembangan Agroindustri/ Agrobisnis	2.300.000.000,00	2.214.046.434,00	85.953.566,00
	- Pengamanan (safeguarding) Perikanan	2.300.000.000,00	2.214.046.434,00	85.953.566,00
3	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	270.000.000,00	252.581.600,00	17.418.400,00
	- Penyusunan Database SKPD sebagai Penunjang Pusat Data Provinsi Jawa Timur	270.000.000,00	252.581.600,00	17.418.400,00
4	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	16.195.725.000,00	15.244.515.551,00	951.209.449,00
	- Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	16.195.725.000,00	15.244.515.551,00	951.209.449,00

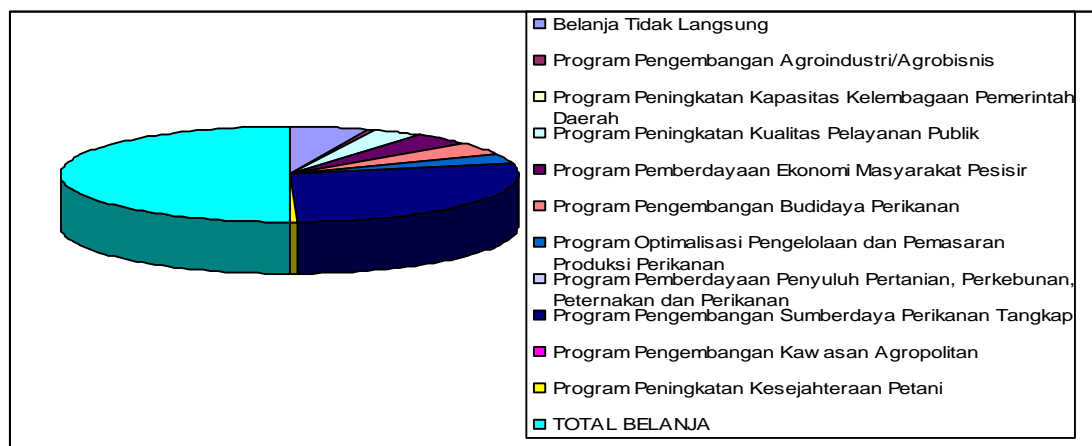
5	Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir	18.771.500.000,00	15.799.594.165,00	2.971.905.835,00
	- Pengelolaan Jasa Lingkungan dan Kelautan	152.435.000,00	147.411.250,00	5.023.750,00
	- Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	800.000.000,00	770.973.950,00	29.026.050,00
	- Pembinaan Hukum dan Legislasi Bidang Pesisir dan P2K	78.640.000,00	75.709.800,00	2.930.200,00
	- Perencanaan dan Pengelolaan Pesisir dan Lautan Terpadu	710.425.000,00	704.558.000,00	5.867.000,00
	- Mitigasi dan Adaptasi terhadap Perubahan Iklim, Bencana dan Pencemaran	400.000.000,00	395.138.050,00	4.861.950,00
	- Pengembangan Kawasan Konservasi Laut, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	1.430.000.000,00	1.416.811.200,00	13.188.800,00
	- Penguatan Kelembagaan dan Akreditasi Program Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	150.000.000,00	142.481.600,00	7.518.400,00
	- Pengembangan Basis Data Spasial dan Informasi Sumberdaya Pesisir dan Pulau-pulau kecil	200.000.000,00	196.675.000,00	3.325.000,00
	- Peningkatan ops SPDN di sentra-sentra nelayan	100.000.000,00	95.055.000,00	4.945.000,00
	- Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam rangka Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	1.450.000.000,00	1.361.965.250,00	88.034.750,00
	- Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam rangka Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan	450.000.000,00	446.864.000,00	3.136.000,00
	- Peningkatan Sarana, Prasarana dan Operasional serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengawasan	2.478.500.000,00	2.318.013.090,00	160.486.910,00
	- Peningkatan Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Perikanan dan Kelautan Guna Penataan dan Penegakan Hukum	950.000.000,00	913.167.000,00	36.833.000,00
	- Pengembangan Sistem	300.000.000,00	295.988.000,00	4.012.000,00

	Pengawasan Berbasis Masyarakat (SISWASMAS)			
	- Jalinkesra Penanganan Rumah Tangga Sangat Miskin di wilayah Pesisir	9.121.500.000,00	6.518.782.975,00	2.602.717.025,00
6	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	19.783.364.000,00	19.165.824.317,00	617.539.683,00
	- Penerapan Good Agriculture Practices (GAP), Good Hatchery Practices (GHP) dan sistem jaminan mutu berdasarkan Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) budidaya	275.000.000,00	271.849.950,00	3.150.050,00
	- Pengembangan Kawasan Perikanan Budidaya	3.460.000.000,00	3.420.765.300,00	39.234.700,00
	- Pengembangan Induk dan Benih Unggul Perikanan Budidaya	612.000.000,00	606.219.400,00	5.780.600,00
	- Penanggulangan Hama Penyakit Ikan, Pengendalian Obat Ikan serta Monitoring Residu Obat, Bahan Kimia dan Pencemaran/Kontaminan pada Perikanan Budidaya	1.000.000.000,00	998.605.600,00	1.394.400,00
	- Optimalisasi UPTD Bidang Perikanan dan Prasarana Budidaya	7.933.864.000,00	7.905.236.237,00	28.627.763,00
	- Revitalisasi Perikanan Budidaya	1.042.000.000,00	937.051.000,00	104.949.000,00
	- Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam rangka Revitalisasi Perikanan Budidaya	1.820.000.000,00	1.792.566.500,00	27.433.500,00
	- Pengembangan Budidaya Air Payau	600.000.000,00	599.805.080,00	194.920,00
	- Jalinkesra Penanganan Rumah Tangga Sangat Miskin Melalui Program Perikanan Budidaya	3.040.500.000,00	2.633.725.250,00	406.774.750,00
7	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	16.340.500.000,00	14.918.193.255,00	1.422.306.745,00
	- Penguatan kompetensi LPPM-HP dan Lembaga Sertifikasi	3.200.000.000,00	3.121.316.200,00	78.683.800,00
	- Pengembangan informasi usaha dan investasi	500.000.000,00	400.366.000,00	99.634.000,00
	- Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Usaha dan Pemasaran Hasil Perikanan	1.550.000.000,00	1.481.358.000,00	68.642.000,00
	- Peningkatan Mutu dan Pengembangan Pengolahan Hasil Perikanan	4.350.000.000,00	4.112.102.129,00	237.897.871,00

	- Penguatan Kelembagaan dan Pemodalan UMKM Perikanan	700.000.000,00	653.065.300,00	46.934.700,00
	- Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan	100.000.000,00	81.717.200,00	18.282.800,00
	- Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam rangka Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Usaha dan Pemasaran Hasil Perikanan Dalam dan Luar Negeri	1.200.000.000,00	1.186.819.200,00	13.180.800,00
	- Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam rangka Penguatan Kelembagaan dan Pemodalan UMKM Perikanan	300.000.000,00	279.350.000,00	20.650.000,00
	- Fasilitasi Sarana Pelayanan Usaha Pemasaran Hasil Perikanan	1.400.000.000,00	1.323.399.226,00	76.600.774,00
	- Jalinkesra Penanganan Rumah Tangga Sangat Miskin Melalui Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Produk Hasil Perikanan	3.040.500.000,00	2.278.700.000,00	761.800.000,00
8	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan	450.000.000,00	439.729.729,00	10.270.271,00
	- Pelatihan Petani Ikan/Nelayan dalam rangka Peningkatan SDM	100.000.000,00	96.651.000,00	3.349.000,00
	- Pengadaan Alat Bantu Penyuluhan dan Sarana Operasional Penyuluh	100.000.000,00	99.578.729,00	421.271,00
	- Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam rangka Revitalisasi Penyuluhan Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan	250.000.000,00	243.500.000,00	6.500.000,00
9	Program Pengembangan Sumberdaya Perikanan Tangkap	130.375.500.000,00	118.199.032.520,00	12.176.467.480,00
	- Pengembangan Tehnologi Perikanan Tangkap dan Operasional UPTD Tangkap	1.935.000.000,00	1.710.976.215,00	224.023.785,00
	- Revitalisasi perikanan tuna	150.000.000,00	128.000.000,00	22.000.000,00
	- Pembangunan dan Rehabilitasi Prasarana Perikanan (Pelabuhan Perikanan dan PPI) dan Peningkatan Sarana Perikanan Tangkap	100.850.000.000,00	100.473.837.805,00	376.162.195,00

	- Operasional UPT Bidang Tangkap (PPP/PPI) dalam Rangka Pelaksanaan SOP	1.500.000.000,00	1.438.967.800,00	61.032.200,00
	- Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumberdaya Ikan dan Rehabilitasi/Pemulihan SDI di WPP 712 (Laut Jawa) dan WPP 573 (Samudera Hindia Selatan Jawa)	10.575.500.000,00	10.231.842.400,00	343.657.600,00
	- Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap Skala Kecil dan Minapolitan di Jawa Timur	400.000.000,00	285.278.300,00	114.721.700,00
	- Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Peningkatan SDM Nelayan, Wanita Nelayan dan Taruna Nelayan	2.400.000.000,00	2.181.089.000,00	218.911.000,00
	- Restrukturisasi Armada Perikanan di Jawa Timur	310.000.000,00	231.794.600,00	78.205.400,00
	- Optimalisasi Fasilitas dan Operasional Pelabuhan Perikanan dan Pangkalan Pendaratan Ikan se Jawa Timur	1.200.000.000,00	1.192.376.400,00	7.623.600,00
	- Pengendalian dan Peningkatan Pelayanan Perijinan Usaha Pengembangan Jaringan	265.000.000,00	253.150.000,00	11.850.000,00
	- Restrukturisasi Armada Kapal Perikanan Jatim	10.790.000.000,00	71.720.000,00	10.718.280.000,00
10	Program Pengembangan Kawasan Agropolitan	425.000.000,00	424.798.300,00	201.700,00
	- Fasilitas Pengembangan Kawasan Agropolitan Dibidang Budidaya Perikanan	200.000.000,00	199.860.000,00	140.000,00
	- Pembentukan dan Pengembangan Klaster Komoditas Perikanan Unggulan Berpotensi Ekspor	125.000.000,00	124.938.300,00	61.700,00
	- Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pembudidaya Ikan/Nelayan di Kawasan Agropolitan	100.000.000,00	100.000.000,00	0
11	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	2.035.136.000,00	2.026.788.454,55	8.347.545,45
	- Fasilitas Program Anti Kemiskinan (APP) Bidang Perikanan	2.035.136.000,00	2.026.788.454,55	8.347.545,45
	TOTAL	233.191.564.756,00	213.258.819.552,55	19.932.745.203,45

Grafik 2. Realisasi belanja



Komposisi belanja APBD Tahun Anggaran 2011 Dinas Perikanan Dan Kelautan Provinsi Jawa Timur meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal, seperti pada tabel 5.

Tabel 5. Komposisi belanja TA 2011

No	Uraian Belanja	Target (Rp) setelah perubahan	Realisasi (Rp)	+/-
A	Belanja Tidak Langsung			
1	Belanja Pegawai	26.244.839.756,00	24.573.715.227,00	1.671.124.529,00
B	Belanja Langsung			
1	Belanja Pegawai	8.170.771.120,00	7.568.795.900,00	601.975.220,00
2	Belanja Barang dan Jasa	84.429.999.530,00	67.693.458.765,55	16.736.540.764,45
3	Belanja Modal	114.345.954.350,00	113.422.849.660,00	923.104.690,00
	TOTAL	233.191.564.756,00	213.258.819.552,55	19.932.745.203,45

Belanja Pegawai total target sebesar Rp 34.415.610.876,- sedangkan realisasi sebesar Rp 32.142.511.127,-, terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Belanja Pegawai pada Belanja Tidak Langsung pagu sebesar Rp 26.244.839.756,- realisasi sebesar Rp 24.573.715.227,- sisa anggaran sebesar Rp 1.671.124.529,- adalah sisa yang tidak diserap karena adanya sisa gaji, penghematan belanja tambahan penghasilan PNS (vakasi dan uang makan).

Belanja pegawai pada Belanja Langsung pagu sebesar Rp 8.170.771.120,- realisasi sebesar Rp 7.568.795.900,-, terdapat

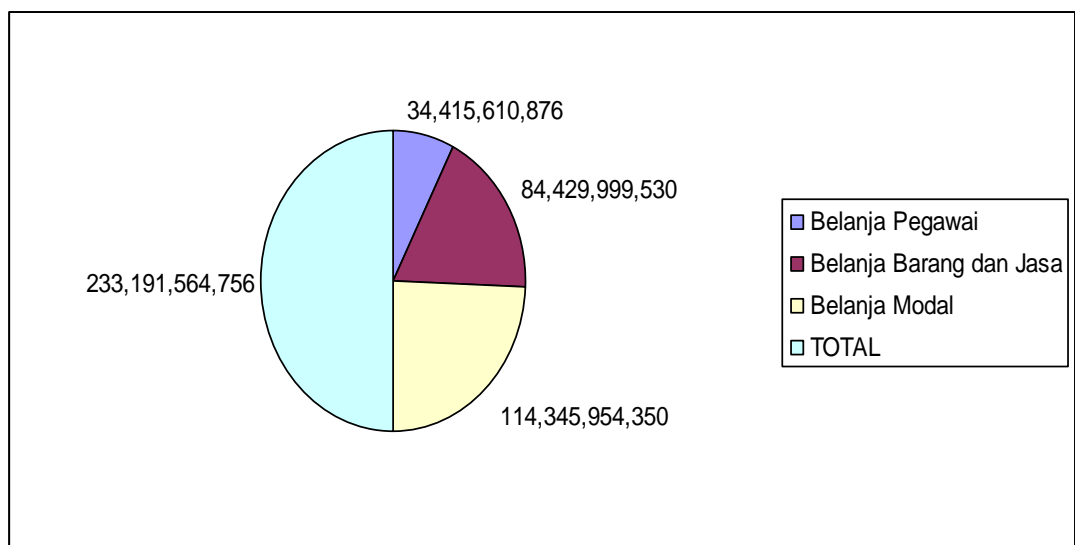
sisa lebih anggaran sebesar Rp 601.975.220,- adalah dalam rangka penghematan.

Belanja Barang dan Jasa pagu sebesar Rp 84.429.999.530,- realisasi sebesar Rp 67.693.458.765,55 terdapat sisa lebih sebesar Rp 16.736.540.764,45 meliputi belanja langganan multimedia, belanja cetak, sewa peralatan dan mesin, belanja telepon, belanja air, belanja listrik, jasa perijinan dan administrasi, partisipasi kegiatan, jasa dokumentasi dan publikasi, bantuan transport dan uang saku, biaya pindah tugas dalam daerah, belanja penggandaan, belanja barang untuk stimulan, perjalanan dinas dalam daerah, perjalanan dinas luar daerah, belanja bahan bakar minyak/gas/pelumas alat operasional dan belanja pemeliharaan ringan peralatan dan mesin.

Sisa lebih ini dikarenakan setor mati paket Jalinkesra penanganan Rumah Tangga Sangat Miskin di wilayah pesisir; tidak terlaksananya program Restrukturisasi Armada Kapal Perikanan karena proses lelang tidak mencukupi yang disebabkan adanya sanggahan banding dengan kontraktor; tidak terlaksananya program Restrukturisasi armada perikanan karena paket kapal tidak terealisasi dan sisa penawaran rekanan.

Pagu Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal dapat dilihat pada Grafik 3.

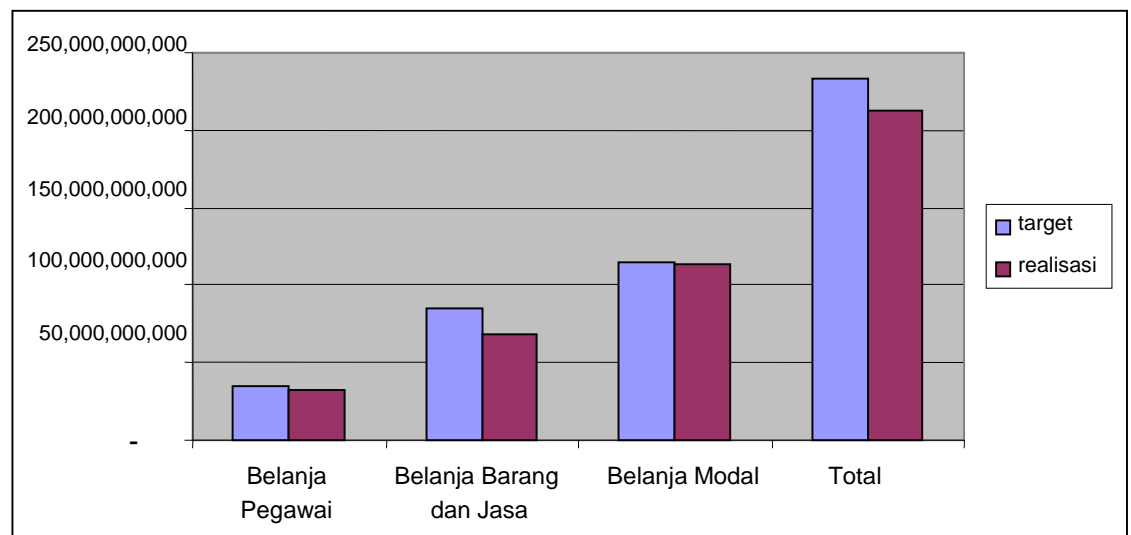
Grafik 3. Pagu Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal



Belanja Modal dengan pagu anggaran Rp 114.345.954.350,-, dengan realisasi sebesar Rp 113.422.849.660,- (99,19 %) sehingga ada sisa anggaran tidak terserap sebesar Rp 923.104.690,-. Sisa anggaran ini terdiri dari sisa Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp 498.650.740,-, Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp 48.563.450,- , Belanja Modal Jalan, Irigasi, Instalasi dan Jaringan sebesar Rp 305.514.000,-, Belanja Modal Lainnya sebesar Rp 1.851.500,- dan sisa Belanja Modal Tidak Berwujud sebesar Rp 68.525.000,-. Sisa belanja dikarenakan sisa lelang belanja modal peralatan, perlengkapan kantor dan rumah tangga dan waktu proses lelang untuk belanja modal alat-alat angkutan tidak mencukupi/melebihi dari waktu tutup anggaran.

Komposisi belanja TA 2011 dapat dilihat pada grafik 4.

Grafik 4. Komposisi belanja TA 2011



5.1.3 Aset

Aset terbagi menjadi 2 (dua) yaitu Aset Lancar dan Aset Tetap. Jumlah Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp 113.422.849.660,- diakui sebagai Aset Tetap sebesar Rp 110.126.274.160,-, Aset Ekstra Komptabel sebesar Rp 97.450.500,- dan Aset Tak Berwujud sebesar Rp 3.199.125.000,-

Aset Lancar terdiri dari Kas, Persediaan dan piutang. Aset lancar ini merupakan Sisa Persediaan Per 31 Desember 2011 sebesar Rp 86.464.011,- berdasarkan stock opname terlampir, yang terdiri

dari Sisa Alat Tulis Kantor dan piutang lainnya sebesar Rp 3.477.705,- berasal dari denda keterlambatan pekerjaan sped boot untuk Poskamladu Tamperan Pacitan.

- **Kas**

Kas di Bendahara Penerimaan maupun di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2011 sudah disetor di Kas Daerah berdasarkan bukti Surat Tanda Setoran Tanggal 30 Desember 2011 sebesar Rp 2.417.961.976,45 dengan bukti terlampir

- **Persediaan**

Persediaan dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksud untuk mendukung kegiatan operasional Dinas sampai akhir anggaran masih terdapat sisa persediaan s/d 31 Desember 2011 sebesar Rp 86.464.011,- (*Laporan Persediaan barang pakai habis dari tanggal 1 Oktober 2011 s/d 31 Desember 2011*), yang terdiri dari Sisa Alat Tulis Kantor.

Aset Tetap

Klasifikasi aset tetap terdiri dari tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan serta aset tetap lainnya.

No	Uraian	Per 31 Desember 2010 (Rp)	bertambah	Per 31 Desember 2011 (Rp)
1	Tanah	503.765.850.050,00	-	503.765.850.050,00
2	Peralatan dan Mesin	40.179.458.503,00	9.741.209.560,00	49.920.668.063,00
3	Gedung dan Bangunan	36.315.354.906,00	5.510.792.030,00	41.826.146.936,00
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	290.872.660.919,00	97.161.064.600,00	388.033.725.519,00
5	Aset Tetap Lainnya	170.399.650,00	3.100.000,00	173.499.650,00

- **Tanah**

Nilai aset tanah 31 Desember 2010 s/d 31 Desember 2011 tidak mengalami perubahan (tetap) sebesar Rp 503.765.850.050,-. (Rekap Jumlah Mutasi Barang TA 2011)

No	Uraian	Per 31 Desember 2010 (Rp)	bertambah	Per 31 Desember 2011 (Rp)
1	Tanah	503.765.850.050,00	-	503.765.850.050,00

- **Peralatan dan Mesin**

No	Uraian	Per 31 Desember 2010 (Rp)	bertambah	Per 31 Desember 2011 (Rp)
1	Alat2 besar	6.866.493.370,00	163.378.000,00	7.029.871.370,00
2	Alat2 angkutan	6.163.783.488,00	1.717.567.555,00	7.881.351.043,00
3	Alat2 bengkel & alat2 ukur	815.666.078,00	594.682.000,00	1.410.348.078,00
4	Alat2 pertanian	3.153.723.165,00	1.038.098.915,00	4.191.822.080,00
5	Alat2 kantor & rumah tangga	11.095.104.428,00	4.928.251.265,00	16.023.355.693,00
6	Alat studio & alat komunikasi	7.173.604.574,00	703.418.825,00	7.877.023.399,00
7	Alat2 kedokteran	112.000.000,00	-	112.000.000,00
8	Alat2 laboratorium	4.798.083.400,00	595.813.000,00	5.393.896.400,00
9	Alat-alat Persenjataan/Keamanan	1.000.000,00	-	1.000.000,00

Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2010 sebesar Rp 40.179.458.503,- bertambah sebesar Rp 9.741.209.560,- sehingga Per 31 Desember 2011 menjadi Rp 49.920.668.063,- (Rekap Jumlah Mutasi Barang TA 2011) Meliputi :

- o Alat-alat besar sebesar Rp 163.378.000,- terdiri dari genset, generator dan generator silent.
- o Alat-alat Angkutan sebesar Rp 1.717.567.555,- terdiri dari speed boat, gerobak motor, mobil double cabin, mobil dinas pintar masak, dan trolley/kereta dorong.
- o Alat Bengkel dan Alat Ukur sebesar Rp 594.682.000,- terdiri dari tool kit set, rak perbengkelan, box aluminium truk, mesin peraga solar, craine, mesin gerinda potong,

- mesin bor listrik, mesin las listrik, mesin peraga bensin, generator set, bor duduk dan tangan, dan mesin roll pipa
- Alat Pertanian sebesar Rp 1.038.098.915,- terdiri dari timbangan duduk, corong penetasan, pompa air, kincir air, pompa celup, konverter, mini genset, blower, bak fiber, cool box, timbangan pakan, jaring, pompa diesel, pontos, mesin air laut, mesin pompa, tabung oksigen, heater, super cas, dan ice chruiser.
 - Alat Kantor dan Rumah Tangga sebesar Rp 4.928.251.265,- terdiri dari komputer, printer, note book/laptop, echo sounder, UPS, kipas angin, mebelair, AC, hardisk external, tabung pemadam kebakaran, lemari freezer, kulkas, brankas, mesin ketik elektrik dan manual, Infokus, CPU, tabung gas dan regulator, scanner, televisi, mesin fax, dispenser, modem external, mesin penghitung uang, dan alat-alat perikanan
 - Alat studio dan alat komunikasi sebesar Rp 703.418.825,- terdiri dari Televisi, proyektor, megaphone, camera, receiver, handycam, OHP, sound system, handy talkie dan wireless portable mic
 - Alat-alat kedokteran tidak bertambah.
 - Alat Laboratorium sebesar Rp 595.813.000,- berupa ultra sentrifuge, mikroskop, nanodrop, nitrogen distilation, inkubator, dan bag mixer
 - Alat-alat persenjataan/keamanan tidak bertambah.

- Gedung dan Bangunan

No	Uraian	Per 31 Desember 2010 (Rp)	bertambah	Per 31 Desember 2011 (Rp)
1	Bangunan Gedung	36.315.354.906,00	5.510.792.030,00	41.826.146.936,00
2	Monumen	-	-	-

Gedung dan Bangunan s/d 31 Desember tahun 2010 sebesar Rp 36.315.354.906,- bertambah sebesar Rp 5.510.792.030,- terdiri

dari Realisasi Belanja Modal Rp 3.288.924.000,- (*Rekap Jumlah Mutasi Barang TA 2011 dan Daftar Mutasi Barang TA 2011*) sesuai daftar terlampir dan Realisasi Non Belanja Modal sebesar Rp 2.221.868.030,- (*Rekap Penjelasan Penambahan Aset Tetap dan Aset Tak Berwujud Dalam Mutasi Barang Tahun 2011*) berasal dari Pemeliharaan ringan Gedung dan Bangunan Kantor Provinsi sebesar Rp 1.710.416.400,- dan pemeliharaan berat sebesar Rp 511.451.630,- yang dikapitalis sebagai aset tetap sehingga jumlah Gedung dan Bangunan s/d 31 Desember 2011 menjadi sebesar Rp 41.826.146.936,-.

Pertambahan Gedung dan Bangunan terdiri dari pemagaran UPBL Situbondo, Rumah jaga tambak dinas, pematang dan plesterisasi dasar petakan, los penjualan ikan segar, pembangunan sandaran kapal, pembangunan bak plankton, pembuatan biosecurity, pembangunan pos kamladu, pembuatan kanopi, pembuatan taman (landscape), pemagaran UPBAT Punten, bak treatment, dan pembangunan gedung kantor.

- Jalan, Irigasi dan Jaringan

No	Uraian	Per 31 Desember 2010 (Rp)	bertambah	Per 31 Desember 2011 (Rp)
1	Jalan dan jembatan	2.189.597.325,00	-	2.189.597.325,00
2	Bangunan air irigasi	287.689.245.292,00	95.378.676.413,25	383.067.921.705,25
3	Instalasi	557.974.000,00	319.509.600,00	877.483.600,00
4	Jaringan	435.844.302,00	224.023.000,00	659.867.302,00

(*Rekap Jumlah Mutasi Barang TA 2011 dan Daftar Mutasi Barang TA 2011*)

Kegiatan Jalan dan jembatan per 31 Desember 2010 sebesar Rp 2.189.597.325,- dan sampai dengan 31 Desember 2011 tidak ada perubahan (tetap). Bangunan air irigasi s/d 31 Desember tahun 2010 sebesar Rp 287.689.245.292,- dari realisasi Belanja Modal bangunan air Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp 96.617.532.000,- berkurang sebesar Rp. 1.238.855.586,75 (*penjelasan terhadap realisasi belanja modal tahun 2011*) atas temuan BPK kekurangan volume pekerjaan pengembangan pembangunan UPPPP Muncar sehingga aset tetap Bangunan Air

Tahun 2011 berubah menjadi Rp 95.378.676.413,75 sehingga Jumlah Belanja Modal Bangunan Air per 31 Desember 2011 menjadi sebesar Rp 383.067.921.705,25.

Penambahan bangunan air irigasi sebesar Rp 95.378.676.413,25 terdiri dari :

- Pengembangan pembangunan Rp 7.474.712.720,-
UPPPP Pondokdadap
- Pengembangan pembangunan Rp 12.233.231.000,-
UPPPP Mayangan
- Pengembangan pembangunan Rp 8.657.839.500,-
UPPPI Pasongsongan
- Pengembangan pembangunan Rp 31.676.471.935,-
PPI Bulu
- Pengembangan pembangunan Rp 35.326.421.258,25
UPPPP Muncar

Kegiatan instalasi per 31 Desember 2011 bertambah sebesar Rp 319.509.600,- dari semula per 31 Desember 2010 sebesar Rp 557.974.000,- menjadi sebesar Rp 877.483.600,- per 31 Desember 2011 terdiri dari instalasi listrik, instalasi pembangunan air bersih, instalasi pintu air buangan pertanian, dan instalasi air laut.

Jaringan s/d 31 Desember 2010 sebesar Rp 435.844.302,-, per 31 Desember 2011 bertambah sebesar Rp 224.023.000,- menjadi Rp 659.867.302,-.

- **Aset Tetap Lainnya**

No	Uraian	Per 31 Desember 2010 (Rp)	bertambah	Per 31 Desember 2011 (Rp)
1	Buku dan perpustakaan	70.079.650,00	3.100.000,00	73.179.650,00
2	Barang bercorak kebudayaan	100.320.000,00	-	100.320.000,00
3	Hewan ternak serta tanaman	-	-	-

Aset Tetap Lainnya bertambah sebesar Rp 3.100.000,- dari semula per 31 Desember 2010 sebesar Rp 170.399.650,- menjadi

sebesar Rp 173.499.650,- per 31 Desember 2011. Penambahan berasal dari Buku dan Perpustakaan sebesar Rp 3.100.000,-, Barang bercorak kesenian/kebudayaan dan Hewan Ternak Serta tanaman tahun 2011 tidak ada penambahan sehingga nilainya tetap (*Rekap Jumlah Mutasi Barang TA 2011*).

Aset Lainnya

Adalah aset selain aset lancar, investasi dan aset tetap. Aset Lainnya per 31 Desember 2011 bertambah sebesar Rp 3.199.125.000,- dari semula per 31 Desember 2010 sebesar Rp 2.306.067.000,- menjadi sebesar Rp 5.505.192.000,-. Penambahan berasal dari Aset Tak Berwujud sebesar Rp 3.199.125.000,- berupa perencanaan, software komputer dan Kajian/Penelitian. (*Daftar Aktiva Tak Berwujud*)

- **Aktiva** yaitu penjumlahan dari Kewajiban dengan Ekuitas Dana atau Modal. Jumlah Aktiva sebesar Rp 989.311.546.229,- di investasikan kedalam Aset Tetap sebesar Rp 983.719.890.218,- dan Aset Lainnya sebesar Rp 5.505.192.000,- serta Ekuitas Dana Lancar sebesar Rp 86.464.011,-, sehingga balance antara Jumlah Aktiva dengan Jumlah Kewajiban dan Ekuitas dana.

5.1.4 Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Kewajiban ini terdiri dari utang pajak.

Utang pajak selama tahun 2011 sebesar Rp 1.707.846.743,- dan telah disetor sampai dengan akhir Desember 2011 sehingga tidak ada lagi pajak terhutang (Nihil).

5.1.5 Ekuitas Dana

Ekuitas dana merupakan pos pada neraca pemerintah yang menampung selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Terdiri dari Ekuitas Dana Lancar dan Ekuitas Dana Investasi.

- Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih antara aset lancar terhadap kewajiban, semula per 31 Desember 2010 sebesar Rp 227.848.375,- menjadi Rp 86.464.011,- per 31 Desember 2011.
- Ekuitas Dana Investasi merupakan selisih antara aset tetap terhadap kewajiban, semula per 31 Desember 2010 sebesar Rp 873.609.791.028,- menjadi sebesar Rp 989.225.082.218,- per 31 Desember 2011.

5.2. Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual.

Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pos pendapatan dan belanja telah dilaksanakan rekonsiliasi dengan entitas pelaporan berdasar basis kas.

BAB VI Penjelasan atas informasi non keuangan

- a. Domisili dan bentuk hukum entitas serta yuridiksi entitas berada

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan Dan Kelautan Provinsi Jawa Timur berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 9 Tahun 2008. Domisili Kantor Dinas Perikanan Dan Kelautan Provinsi Jawa Timur di Jl. A. Yani 152 B Surabaya.

- b. Komitmen atau kontinjensi yang tidak dapat disajikan pada Neraca dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

BAB VII Penutup

Laporan Keuangan APBD Dinas Perikanan Dan Kelautan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2011, mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), terdiri dari LRA, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).

Laporan Dinas Perikanan Dan Kelautan Provinsi Jawa Timur sebagai entitas akuntansi merupakan bagian dari Laporan Keuangan entitas pelaporan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Demikian Laporan Keuangan ini dibuat sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perikanan Dan Kelautan Provinsi Jawa Timur.

PENGGUNA ANGGARAN

Ir. KARDANI, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19541113 198103 1 012